

2025

LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN II

**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si

Ketua:

Neni Isnaeni, S.Si., Apt., M.

Anggota:

Andi Herman Andi Tantu, SE

Atiek Supardiati Eka S., S.Si., Apt., M.KM

Atika Aprillia Purnama, S.M.

Dara Sevyra Ayuningtyas, S.Ak

Diah Lestari, S.Si., M.Si.

Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si

Dwi Susilowati, S.M

Hasna Nur Syahidah, S.Farm., Apt

Innike Sintawatie Maulidyah, STP., M.Si

Maisaroh, SE

Nurul Azizah, S.Si

Prima Purnama, S.Farm

Raisa Vonna Fatimah, S.Kom

Sri Purwaningsih, S.F, Apt.,M.Si

Sri Utaminingsih, S.Si., Apt.

Widiyanto Kurniawan, S.Farm, Apt, M.Sc

Widya Sagita Br. Tampubolon, S.Si

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dapat diselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga. Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

(PPPOMN) yang merupakan salah satu satuan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah menyelenggarakan SAKIP, untuk itu PPPOMN wajib menyusun Laporan Kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dan awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Interim TW II merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja PPPOMN tahun 2025 triwulan II. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2025-2029 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Eselon II Tahun 2025. Sasaran Strategis PPPOMN 2025-2029 disusun berdasarkan *log frame* (kerangka logis) Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPPOMN berkontribusi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 4 Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Laporan Kinerja ini berisi penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis PPPOMN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kendala/hambatan dalam mencapai target kinerja setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan PPPOMN untuk meningkatkan kinerjanya. Dokumen ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis PPPOMN tahun 2025 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim TW II ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja PPPOMN akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 17 Juli 2025
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt.,M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai salah satu unit Satuan Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban PPPOMN atas kinerjanya selama TW II tahun 2025. Disamping itu Laporan Kinerja ini sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja PPPOMN pada TW II tahun 2025 dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki PPPOMN, maka PPPOMN telah menetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029). Empat sasaran kegiatan tersebut adalah (1) Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, (2) Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, (3) Layanan Publik PPPOMN yang prima, dan (5) Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

Dari empat sasaran kegiatan tersebut diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan. Dari 13 indikator kinerja PPPOMN yang ditargetkan TW II tahun 2025, 9 (sembilan) indikator dengan perhitungan realisasi dan capaian dilakukan di akhir tahun. Terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori sangat baik (realisasi $100\% < x \leq 110\%$), yaitu (1) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium, (2) Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (3) Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (4) Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Sesuatu Jejaring Secara Terpadu. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2025, maka proyeksi pencapaian 1 (satu) indikator adalah $\geq 100\%$ dengan **kategori tercapai/melampaui**, 2 (dua) indikator dengan **kategori akan tercapai**, 1 (satu) indikator dengan **kategori perlu upaya keras** dan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang **belum dapat disimpulkan**.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya PPPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 105.800.044.000,- (seratus lima milyar delapan ratus juta sempat puluh empat ribu rupiah). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dalam rangka efisiensi anggaran dan sesuai arahan Sekretaris Utama Badan POM melalui surat Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri dalam rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN Tahun 2025 serta surat nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, pada triwulan I PPPOMN melakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp.65.841.813.000 (enam puluh lima milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dan anggaran PPPOMN menjadi Rp. 39.958.231.000,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Penyerapan anggaran triwulan II sebesar Rp. 24.618.029.316 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan persentase 61,61% terhadap pagu blokir mandiri dan 23,27% terhadap pagu awal sebelum blokir mandiri.

Dalam mencapai target sasaran dan indikator kegiatan PPPOMN triwulan II tahun 2025, terdapat berbagai kendala/ permasalahan antara lain :

- Keterbatasan infrastruktur dan anggaran yaitu belum semua laboratorium yang terintegrasi dalam jejaring memiliki alat dan fasilitas yang sesuai standar untuk jenis pengujian tertentu.
- Hal yang paling krusial adalah isu efisiensi anggaran di tahun 2025 yang berdampak terhadap terbatasnya anggaran operasional untuk pengujian, pengiriman sampel, dan pemeliharaan peralatan.
- Ketimpangan kapasitas antar laboratorium yaitu perbedaan signifikan antar laboratorium yang terlibat dalam suatu jejaring dalam hal kompetensi SDM, peralatan, dan ruang lingkup pengujian. Ketimpangan tersebut kerjasama dalam lingkup jejaring tidak berjalan efektif.
- Sistem informasi tidak terintegrasi yaitu laboratorium belum terkoneksi dalam satu sistem secara nasional atau regional.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, PPPOMN harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.
2. Melakukan intervensi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT BPOM dengan pendampingan intensif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan II PPPOMN tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang, antara lain:

- Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja berbasis digital, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja.
- Melaksanakan analisis dan reviu indikator kinerja kegiatan secara mendalam, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi baseline pada perencanaan strategis PPPOMN periode 2025 sampai dengan 2029 dan indikator kinerja yang telah mencapai target.

HIGHLIGHT

1. Pembahasan Hasil Uji Baku Pembanding bersama Tim Ahli



Baku pembanding merupakan salah satu komponen penting dalam penjaminan mutu hasil pengujian di laboratorium. Ruang lingkup pengembangan baku pembanding di BPOM mencakup baku pembanding untuk pengawasan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan. Pengembangan baku pembanding dilakukan melalui pengujian bahan baku pembanding yang divalidasi terhadap baku pembanding

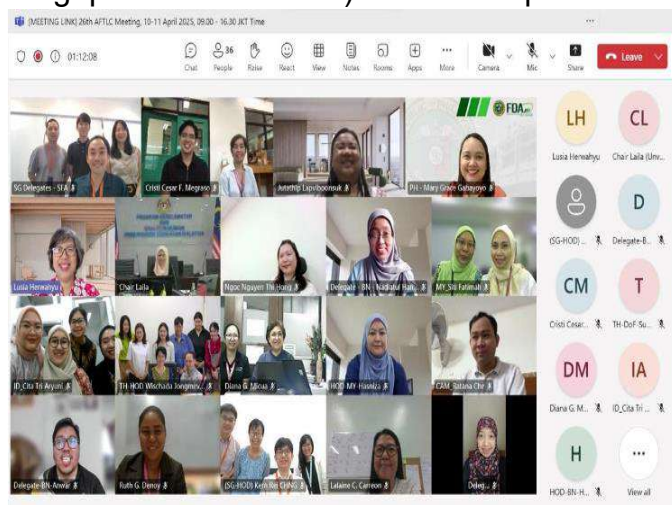
primer. Prosesnya dimulai dari perencanaan produksi, pengadaan bahan, penelusuran pustaka, optimasi metode analisis, validasi metode, karakterisasi, uji homogenitas, uji stabilitas, uji kolaborasi dengan beberapa laboratorium pengujian lainnya, kompilasi dan analisis statistik data hasil kolaborasi, perhitungan ketidakpastian pengukuran, pembuatan draft laporan analisis, pembahasan internal hasil uji baku pembanding, pembahasan hasil uji dan adopsi baku pembanding. Pembahasan hasil uji baku pembanding telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 (Tahap I) dan 30 Juni 2025 (Tahap II) dengan Narasumber Prof. Dr. apt. Slamet Ibrahim Surantaatmadja, DEA dan Prof. Sudibyo Martono, M.S., Apt. Kegiatan diikuti oleh perwakilan dari Direktorat Standardisasi dari kedeputan 1, 2 dan 3, perwakilan penguji dan verifikator Laboratorium Baku Pembanding, PPPOMN, perwakilan Poksi di PPPOMN, staf Laboratorium Baku Pembanding, BBPOM di Yogyakarta, serta perwakilan



dari balai kolaborasi baku pembanding. Pada kegiatan ini telah dilakukan pembahasan 6 kandidat baku pembanding pada Tahap I dan 14 senyawa kandidat baku pembanding pada Tahap II. Harapannya, melalui rapat pembahasan maka baku pembanding yang diterima nantinya dapat secara sah dan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai acuan dalam pengujian mutu obat dan makanan. Adanya efisiensi anggaran akan memberikan potensi dalam berkurangnya pemenuhan kebutuhan baku pembanding, namun dengan langkah-langkah kreatif dan inovatif dapat mengurangi gap ketersediaan baku pembanding pengujian tersebut.

2. Partisipasi aktif pada Sidang the 26th AFTLC (ASEAN Food Testing Laboratory Committee) dan 40th PFPWG (Prepared Foodstuff Product Working Group)

Sidang AFTLC ke-26, diselenggarakan pada tanggal 10 - 11 April 2025 secara daring (*video conference*), dihadiri oleh Sekretariat ASEAN dan perwakilan negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura dan Vietnam). Tidak ada perwakilan dari Myanmar karena kondisi negara



yang sedang terkena bencana alam. Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan dari BPOM, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai *Head of Delegation* (HoD), Indonesia adalah salah satu perwakilan PPPOMN, BPOM. Pada

sidang tersebut disampaikan bahwa ASEAN Sekretariat meminta proposal area baru *ASEAN Food Reference Laboratory (AFRL) for Food Processing Contaminants* pada negara-negara ASEAN dan dapat diterima sebelum tanggal 30 April 2025. Pengusulan AFRL baru *Species Identification* tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota AFTLC. Pada rapat tersebut, Indonesia bersama Vietnam dan Filipina mendapatkan penugasan dari Sidang untuk menyiapkan buletin AFTLC ke-6. PPPOMN melalui Sekretariat Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia akan berkontribusi dalam penyusunan bulletin AFTLC yang ke-6 dengan agenda mengenai AFRL for Food Additive sebelum 30 Agustus

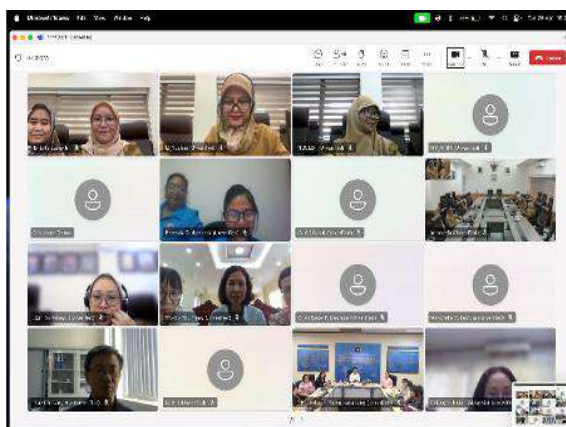
2025. PPPOMN mempersiapkan penyampaian update pelaksanaan kegiatan satu tahun terakhir sebagai AFRL for Food Additives, yang akan disampaikan dalam sidang AFTLC ke-27.

3. Partisipasi 24th ACTLC Meeting



Pertemuan ke - 24 Komite Laboratorium Pengujian Kosmetik ASEAN (ACTLC) dilaksanakan pada 28 - 29 April 2025 secara daring. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Sekretariat ASEAN. Pertemuan ini merupakan bagian dari

rangkaian meeting ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ke-42 yang dihadiri oleh perwakilan dari sekretariat ASEAN serta negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dalam kesempatan ini, Indonesia memaparkan progress elevasi metode uji 1,4-Dioksan dalam produk kosmetik (ISO/PWI 24913) ke tingkat Internasional, yaitu standar ISO. Saat ini, proses tersebut sudah berada dalam tahap pengumpulan ballot 5 negara pendukung yang diperlukan dan sudah terdapat 3 negara yang memberikan dukungan kepada Indonesia serta Indonesia sedang berproses menggalang dukungan dari negara lainnya.



4. Pendampingan Pemenuhan SKL Tingkat 1 dan 2

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang digunakan sebagai acuan penilaian atau pengukuran kemampuan laboratorium Badan POM dalam pelaksanaan pengujian, pengembangan pengujian, baku pembanding dan standar kompetensi. Dalam rangka peningkatan pemenuhan SKL Tingkat 1 dan 2 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Penerbitan SK Kepala BPOM No. 161



tahun 2025 tentang SKL UPT di Lingkungan BPOM, bimbingan teknis peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring, pendampingan pemenuhan SKL Laboratorium Loka dan Balai POM, dan Monev pemenuhan SKL Tingkat 1 dan Tingkat 2. Pendampingan pemenuhan SKL Laboratorium Loka dan Balai POM, salah satunya dengan visitasi ke 4 UPT,

yaitu Balai POM di Kabupaten Bima, Balai POM di Kabupaten Tulang Bawang, Loka POM di Kabupaten Belitung dan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang telah terlaksana pada tanggal 6 - 9 Mei 2025. Tujuan dari visitasi ini yaitu melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan SKL termasuk progress kelengkapan sarana prasarana laboratorium yang mendukung implementasi fungsi pengujian di laboratorium



Loka/Balai POM. Dari hasil pendampingan secara umum bahwa (1). Status bangunan untuk Balai POM di Kabupaten Bima sudah hak milik sendiri, sedangkan untuk Balai POM di Tulang Bawang berstatus pinjam pakai milik kantor Satpol PP, bangunan di Loka POM di Lubuklinggau dan Loka POM Belitung berstatus sewa; (2). Laboratorium

yang telah tersedia di 4 (empat) UPT adalah laboratorium kimia sedangkan laboratorium mikrobiologi belum tersedia; (3). Laboratorium Loka dan Balai POM telah membuat perencanaan peningkatan pemenuhan SKL dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan (4). Pemahaman terhadap sistem mutu ISO



17025:2017 akan ditingkatkan melalui sosialisasi ISO 17025:2017 yang akan diselenggarakan secara daring oleh PPPOMN.

5. Surveilans ISO 37001:2016



ISO 37001 merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan anti penyuapan. Pusat Pengembangan Pengujian Nasional (PPPOMN) sebagai salah satu unit teknis BPOM menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan telah tersertifikasi ISO 37001:2016 pada 21 Juni 2024. Audit Surveillance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan organisasi dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar internasional yang berlaku. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen anti penyuapan yang telah diterapkan tetap efektif, dijalankan secara konsisten, dan mengalami perbaikan berkelanjutan sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016. Audit surveilans ini merupakan bagian dari siklus sertifikasi ISO 37001 yang dilakukan secara periodik, guna memverifikasi bahwa tidak terjadi penyimpangan signifikan terhadap standar yang ditetapkan, serta untuk menilai sejauh mana organisasi telah mengidentifikasi, mencegah, dan menangani risiko penyuapan dalam proses bisnisnya. Pada pelaksanaannya, tim auditor menilai berbagai elemen sistem SMAP termasuk kebijakan anti penyuapan, pelaporan dan investigasi, pelatihan serta kesadaran karyawan, dan mekanisme pengendalian internal lainnya. Proses audit dilakukan melalui metode wawancara, peninjauan dokumen, observasi langsung, serta verifikasi terhadap tindakan korektif sebelumnya. Surveilans ISO 37001:2016 telah dilaksanakan secara daring pada 12 Juni 2025 dengan tim auditor dari PT



Garuda Sertifikasi Indonesia, yaitu Ditta Avionita Ristiyanti dan Adhania Nurul Hanifah, dengan auditan Tim Mutu, Tata Usaha, Pelayanan Infalabs, Pengembangan Metode Analisis, dan Baku Pemandang, Pelayanan Pengujian, Pelayanan Pelatihan, serta Pengelolaan Peralatan Laboratorium. Dari surveilan ini dapat disimpulkan PPPOMN secara konsisten menerapkan SNI ISO 37001:2016, namun masih perlu adanya peningkatan misal dengan melakukan monitoring terhadap observasi untuk meningkatkan penerapan SMAP di PPPOMN.

6. Green Lab Forum and Awards

Laboratorium hijau (*green laboratory*) merupakan laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, operasional, serta



pengelolaan sumber daya. Konsep *green laboratory* bukan hal baru di BPOM, prinsip ini sudah dituangkan dalam Grand Design Penguatan Laboratorium BPOM yang diluncurkan tahun lalu. Manfaat dari implementasi *green laboratory* ini antara lain pengurangan biaya operasional jangka panjang, peningkatan

kesehatan dan keselamatan kerja, kontribusi pada tujuan keberlanjutan global, serta meningkatkan citra institusi. Pada tanggal 26 Juni 2025, Kepala BPOM Bapak Taruna Ikrar secara langsung menyerahkan penghargaan bagi laboratorium-laboratorium



terbaik dalam ajang **Green Laboratory Forum and Awards BPOM**. Acara penghargaan ini digelar di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, dan menjadi salah satu bukti nyata bahwa laboratorium BPOM siap menjawab tantangan global. Lomba Implementasi Green Laboratory BPOM 2025 telah

diikuti oleh 38 laboratorium dari total 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia. Para peserta dinilai oleh Tim Green Laboratory PPPOMN dengan empat aspek utama: efisiensi

energi, efisiensi air, kesehatan dan kenyamanan ruangan, serta pengelolaan material. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengumpulan data pada April – Mei 2025 hingga tahap verifikasi lapangan melalui visitasi. Dari tahap penilaian ini, dipilih 10 laboratorium dengan skor tertinggi, lalu disaring lagi menjadi lima terbaik. Juara Umum diraih Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, disusul BBPOM di Palangka Raya sebagai Runner Up. Piagam diserahkan langsung oleh Taruna Ikrar kepada Sofiyani Chandrawati Anwar dan Ali Yudhi Hartanto, pimpinan dari masing-masing UPT pemenang. Selain penghargaan umum, BPOM juga memberikan apresiasi untuk kategori penilaian khusus. BBPOM Palangka Raya meraih penghargaan Efisiensi Energi, BBPOM Medan untuk Efisiensi Air, BBPOM Banjarbaru pada Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan, BBPOM Mataram di kategori Sumber dan Siklus Material, serta Inovasi Terbaik diraih BBPOM Jakarta. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi laboratorium lainnya untuk bergerak ke arah yang sama. Masih ada 38 laboratorium UPT yang sekarang sedang dipetakan. Dalam dua tahun ke depan, diharapkan implementasi *green laboratory* bisa diterapkan secara menyeluruh.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4 ISU STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	9
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA	15
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	16
2.5 METODE PENGUKURAN	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI	77
3.3 REALISASI ANGGARAN	80
BAB IV PENUTUP	85
4.1. KESIMPULAN	85
4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	86
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Rencana Kerja Tahunan PPPOMN Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja PPPOMN Tahun 2025	15
Tabel 2.5.3 Metode Pengukuran Kinerja PPPOMN.....	20
Tabel 3.1.14 Capaian Kinerja "Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" terhadap target Tahun 2025 ...	49
Tabel 3.1.15 Capaian Kinerja Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan TW II.....	51
Tabel 3.1.16 Capaian Kinerja "Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" terhadap Target Tahun 2025	53
Tabel 3.1.17 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan" TW II	56
Tabel 3.1.18 Capaian Kinerja "Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan" terhadap target Tahun 2025	58
Tabel 3.1.19 Capaian Kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" TW II	61
Tabel 3.10 Capaian kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" terhadap Target Tahun 2025	61
Tabel 3.11 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" TW II	64
Tabel 3.12 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" terhadap target tahun 2025	65
Tabel 3.13 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" TW I.....	69
Tabel 3.14 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" terhadap target tahun 2025.....	69
Tabel 3.15 Capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN TW II Tahun 2025	72
Tabel 3.16 Capaian Kinerja "Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN" terhadap Target Tahun 2025	72
Tabel 3.17 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" TW II tahun 2025.....	75
Tabel 3.18 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" terhadap Target tahun 2025.....	76
Tabel 3.2.19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.....	77
Tabel 3.3.2 Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja PPPOMN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	48
Gambar 3.1.2 Capaian Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	53
Gambar 3.1.3 Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	57
Gambar 3.1.4 Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I Tahun 2025.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen penting yang mencerminkan kinerja dan akuntabilitas sebuah instansi pemerintah. Penyusunan dokumen ini diperlukan untuk beberapa alasan utama yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. LAKIP memastikan bahwa instansi pemerintah bekerja dengan transparan dan akuntabel. Dokumen ini menyediakan informasi yang jelas dan detail mengenai pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh instansi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan menilai bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya. LAKIP berfungsi sebagai alat evaluasi bagi instansi pemerintah. Dokumen ini membantu dalam menilai sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) telah tercapai. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan serta menemukan area yang memerlukan perbaikan, dengan menyusun LAKIP, instansi pemerintah dapat menganalisis data kinerja yang ada untuk merencanakan kegiatan dan program di masa mendatang. Hal ini memastikan bahwa setiap rencana kerja didasarkan pada data yang akurat dan relevan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan. Dengan adanya laporan ini, dapat diketahui bagaimana anggaran digunakan dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, penyusunan LAKIP menjadi sangat penting bagi setiap instansi pemerintah. Proses ini tidak hanya membantu dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung upaya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. PPPOMN sebagai salah satu unit kerja di BPOM sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka PPPOMN memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dan setiap triwulan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW II tahun 2025 PPPOMN merujuk kepada Rencana Strategis PPPOMN tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala PPPOMN tahun 2025.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tahun 2001 dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan sesuai SK Kepala BPOM No.02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Pusat Pengujian Obat dan Makanan berubah nama menjadi “Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN)”. Sesuai dengan Bab IX bagian pertama SK Kepala BPOM No. 02001/SK/KBPOM Tahun 2001, PPOMN adalah unsur pelaksana tugas Badan POM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017, PPOMN berubah menjadi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian Obat dan Makanan.

Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang telah diubah 2 (dua) kali terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPPOMN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding
- b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding
- c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional
- d. pelaksanaan uji profisiensi dalam lingkup nasional dan internasional
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku Pembanding

- g. pelaksanaan administrasi pusat pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan PPPOMN, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN :

1. Balai Pengujian Produk Biologi mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang Produk Biologi
2. Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan Kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan
3. Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan Pengujian Khusus Obat dan Makanan

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN juga membawahi 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan struktur organisasi sebagai berikut:



1.4 ISU STRATEGIS

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis PPPOMN perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran strategis, baik isu internal maupun eksternal.

- ISU INTERNAL PPPOMN ANTARA LAIN:

1. Terlaksananya kemandirian satuan kerja mandiri/UPT PPPOMN termasuk anggaran dan sasaran strategis tiga UPT PPPOMN.
2. Tidak berlakunya SK Lab Unggulan BBPOM di Yogyakarta terkait penugasan pengembangan BP.
3. Belum adanya integrasi dan pengawasan integritas sistem data di laboratorium terkait pelayanan yang diberikan.
4. PPPOMN Belum memiliki *Business Continuity Plan* untuk memastikan keberlangsungan proses pengujian dengan adanya bencana, krisis ataupun musibah di laboratorium.
5. Pengelolaan sumberdaya laboratorium untuk menunjang tugas pengawasan obat dan makanan.
6. Kebutuhan laboratorium pengembangan Baku Pembanding, laboratorium pengembangan pengujian KOBONAPPZA dan laboratorium pengembangan pengujian KPOA untuk kegiatan administrasi dan pengarsipan.
7. SDM PPPOMN yang tidak kompeten dan tidak berkinerja optimal.
8. Kebutuhan laboratorium pengembangan pengujian KOBONAPPZA/ laboratorium pengembangan Baku Pembanding untuk kegiatan pelayanan yaitu administrasi, pengarsipan, distribusi dan pengelolaan PNBP (penyusunan HPP, SBK, stock opname dll).
9. Adanya kegiatan/fungsi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi utama pegawai.
10. Masalah AC ruangan laboratorium yang suhunya panas dan menyebabkan rusaknya beberapa peralatan, sebaiknya dicari sumber masalahnya agar tidak menjadi problem sepanjang tahun.
11. Kebocoran plafon di beberapa tempat di laboratorium yang membahayakan keselamatan personil laboratorium.

12. Perlunya revitalisasi laboratorium guna menunjang pengujian.
13. Alat *idle* di PPPOMN.
14. Reagen yang akan dan telah kedaluwarsa yang belum terpakai.
15. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan jaringan listrik dan pemeliharaan gedung dan bangunan terbatas.
16. Balai/POKSI meminta Pegawai TU untuk di rotasi ke Balai/POKSI.
17. Belum memiliki ruangan untuk pembuatan sampel negatif porcine untuk Provider UP Molekuler. Selama ini pembuatan sampel negatif memakai ruang kuliah saat ruang kuliah sedang tidak digunakan.
18. Penambahan peralatan laboratorium pengembangan Baku Pembanding kimia.
19. Kurangnya jumlah SDM laboratorium pengembangan MA, pengujian kimia OTOKSKK/laboratorium pengembangan pengujian KPOA untuk kebutuhan pengawasan.
20. Pengelolaan pola karir SDM PPPOMN masih kurang optimal.
21. Belum memadainya sarana prasarana laboratorium (kebutuhan alat lab, pemeliharaan, refreshment alat lab yang sudah tidak layak, dll).
22. Biaya pemeliharaan dan perbaikan alat masih terbatas, terutama alat pengujian rokok, LC MS/MS QTOF dan ICPMS yang memerlukan biaya cukup mahal.
23. Implementasi LIMS di laboratorium pengembangan pengujian KOBONAPPZA dilaksanakan dari tahun 2024. Implementasi LIMS ini membutuhkan perubahan contohnya pengujian paper based menjadi digital, perubahan prosedur terkait alur kerja, dan pelatihan personel penguji. Selain itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan personel untuk input seluruh data laboratorium yang dibutuhkan untuk pengujian ke sistem LIMS (inventory dan pembuatan seluruh prosedur pengujian dan perhitungan).
24. Ketidaksesuaian dalam pembuatan naskah dinas dengan peraturan yang mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Badan POM.
25. Penerapan risiko belum sampai ke masing-masing pegawai.
26. Belum memanfaatkan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara memadai dalam melakukan revidi atas pengelolaan manajemen risiko.
27. Belum terdapat pengelolaan manajemen K3.

28. SOP Makro pelayanan pengujian belum menyesuaikan bisnis proses UPT PPPOMN setelah menjadi satker mandiri.
29. Kegiatan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi WBS.
30. Belum semua Petugas dan pegawai yang masuk dalam risiko tinggi penerima suap terpapar ISO 37001:2016.

- ISU EKSTERNAL PPPOMN ANTARA LAIN:

1. Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik
2. Percepatan pengujian yang sesuai harapan stakeholder
3. Ketersediaan baku pembanding dan tuntutan pengembangan metode analisis belum memadai sesuai permintaan stakeholder
4. Permintaan pengembangan metode analisis dalam rangka mendukung perdagangan internasional dan kajian regulasi seperti PFAS, EtO, BPA dan lain- lain, asam dihidro asetat dan lain lain.
5. Tuntutan pengembangan metode analisis kosmetik terkait mutu produk, yaitu kebenaran komposisi zat aktif berdasarkan klaim pada label produk kosmetik
6. Adanya persaingan yang tidak sehat akibat belum jelasnya regulasi yang mengatur kegiatan transaksi ecommerce yang diimplementasikan di laboratorium
7. Nilai dan peringkat Indeks korupsi negara Indonesia masih sangat rendah, menunjukkan masih banyaknya kekurangan dan masalah dalam pelaksanaan dan Implementasi program anti penyuapan
8. Adanya interaksi antara pegawai dan pihak ke-3 baik dalam proses pengadaan barang dan jasa, hal perizinan, kerangka bisnis, pelaksana kebijakan, konsultasi, pemeriksaan dan pelaporan
9. Isu perekonomian dengan pertumbuhan kurang baik dan tidak merata akan menyebabkan kondisi yang memungkinkan praktek penyuapan tumbuh subur
10. Keikutsertaan dalam jejaring Nasional dan Internasional
11. Pengawasan Obat dan Makanan adalah tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi antar K/L, Akademisi, maupun Pelaku Usaha termasuk dalam pengujian laboratorium

12. Kebutuhan laboratorium eksternal baik di tingkat nasional maupun internasional terkait pengujian cemaran dalam kosmetik, meliputi 1,4 Dioksan, EG DEG dan Akrilamid
13. Sidang ACC menyetujui ACM 011 “Penentuan Kadar 1,4 Dioksan dalam Kosmetik secara GCMS/HSS” dilanjutkan berproses menjadi metode internasional ISO
14. Tuntutan pengembangan metode analisis terkait pengujian keamanan dan mutu obat bahan alam semakin besar, terutama terkait identifikasi tanaman dilarang dan tanaman mengandung bahan berbahaya
15. PPPOMN sebagai inisiator terbentuknya jejaring Bahan Acuan Nasional
16. Pendampingan PPPOMN dalam peningkatan kemampuan Laboratorium Eksternal untuk pengujian sediaan Farmasi sesuai standar yang ditetapkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Visi dan misi BPOM, tujuan, serta sasaran kegiatan PPPOMN sebagaimana tertuang dalam draft Renstra PPPOMN 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Visi BPOM

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Misi BPOM

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan BPOM

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam

perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Sebagai upaya mewujudkan Visi BPOM dan mewujudkan Misi Indonesia 2025-2029 maka Misi PPPOMN sebagai bagian dari fungsi Pengawasan Obat dan Makanan post market serta untuk mencapai visi BPOM disusunlah misi PPPOMN yang sejalan dengan misi BPOM yang ketiga dan keempat. Misi PPPOMN sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan PPPOMN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, tujuan PPPOMN dalam kurun waktu periode Renstra 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa produk farmasi dan pangan olahan yang tersedia di masyarakat memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Kondisi keamanan ini dimaksudkan bahwa produk farmasi dan pangan olahan tidak mengandung bahan berbahaya atau cemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan pengujian bahan baku dan produk akhir untuk memastikan tidak ada kandungan zat berbahaya baik dari kimia maupun mikroba. Sedangkan untuk kualitas (mutu) maka produk yang diedarkan memiliki standar mutu sesuai yang ditetapkan, yang dipastikan salah satunya melalui pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas produk. Diharapkan dengan terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu ini akan memberikan rasa aman, mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan meminimalkan risiko kesehatan akibat penggunaan atau konsumsi produk yang tidak aman.

2. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri, sediaan farmasi dan pangan olahan aman serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Tujuan ini membangun industri yang kompetitif, mandiri dan inklusif untuk membuat pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri melalui peningkatan produktivitas dengan adanya kualitas sediaan farmasi dan

pangan olahan yang diterima di pasar domestik maupun internasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan industri untuk memastikan bahwa metoda analisa yang digunakan pengujian memastikan kualitas adalah metode yang handal dengan bahan baku / baku pembanding yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini agar produk farmasi dan pangan olahan Indonesia memiliki daya saing tinggi dan diakui secara global juga mendukung kemandirian bangsa yang dapat dilalui dengan pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kapasitas produksi, perlindungan pasar untuk produk lokal. Utamanya hal ini perlu diberikan kepada UMKM. Hasil yang diharapkan tentunya UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi penting terhadap ekonomi nasional, menjadi bagian dari rantai pasok industri farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima

Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima sebagai upaya menciptakan organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat, bekerja secara optimal, serta memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat. Organisasi seperti ini akan lebih mudah mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas. Organisasi yang profesional artinya memiliki sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dan memiliki integritas tinggi. Profesionalisme mencakup sikap, perilaku, dan kompetensi dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang berlaku. Organisasi yang adaptif adalah mampu menanggapi perubahan dengan cepat dan tepat, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Kemampuan beradaptasi penting untuk bertahan dalam menghadapi tantangan baru dan dinamika yang berkembang. Organisasi yang efektif adalah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal sedangkan organisasi yang efisien adalah organisasi yang mampu mengoptimalkan sumber daya (waktu, tenaga, dan anggaran) secara hemat dan maksimal untuk mencapai tujuan.

Sasaran Strategis PPPOMN

Sasaran Strategis PPPOMN 2025-2029 disusun berdasarkan *logframe* (kerangka logis) Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPPOMN masuk ke dalam Sasaran Strategis Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pada Kerangka Logis, PPPOMN berkontribusi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan 4 Sasaran Kegiatan, dengan sasaran kegiatan ini maka PPPOMN mendukung pada pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis PPPOMN disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra 2025-2029, berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki PPPOMN, yaitu:

1. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
3. Layanan Publik PPPOMN yang prima
4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Empat sasaran kegiatan PPPOMN tersebut diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu
2. Persentase pemenuhan laboratorium hijau
3. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
4. Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
5. Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium
6. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
7. Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
8. Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN
10. Nilai Pembangunan ZI PPPOMN

11. Nilai AKIP PPPOMN
12. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN
13. Indeks Manajemen Risiko PPPOMN

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana kinerja tahunan PPPOMN tahun 2025 berdasarkan Kerangka Logis sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Rencana Kerja Tahunan PPPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Suatu Jejaring Secara Terpadu	42
		Persentase Pemenuhan Laboratorium Hijau	40
		Nilai Pemenuhan Laboratorium Telah Didukung Oleh Laboratorium Digital	40
		Persentase Peningkatan Ruang Lingkup Laboratorium Eksternal yang Diberdayakan	10
		Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium	77
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 5	80,78
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 4	72,3
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 3	69,5
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 2	14
		Nilai Pemenuhan Kemampuan Laboratorium Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL Tingkat 1	12,7
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	80,78

		Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Sesuai Kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,38
3	Layanan Publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang Prima	Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4,7
4	Terwujudnya Tatakelola Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	92,10
		Nilai AKIP PPOMN	86,45
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	93,30
		Indeks Manajemen Risiko PPOMN	3,4

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2025 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, dijabarkan dalam 4 (Empat) Sasaran Kegiatan dan 13 (Tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja PPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,5

		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91
		Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91,59
		Nilai AKIP PPPOMN	85
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian kinerja Kepala PPPOMN tahun 2025 selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sebagai berikut:

Tabel 2.4.1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) PPPOMN Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2025	TARGET				ANGGARAN
				B03	B06	B09	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42	-	20	30	42	1.613.766.000
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40	-	-	-	40	389.429.000
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30	-	-	-	30	397.279.000
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4	-	-	-	4	94.040.000
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi	77	-	-	-	77	618.403.000

		laboratorium						
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,5	61,5	62,8	64,1	65,5	76.356.031.000
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	76,82	77,99	79,49	80,91	3.677.000.000
		Presentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	75,51	76,48	78,81	80,04	1.933.797.000
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7	-	-	-	4,7	1.048.765.000
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91,59	-	-	-	91,59	457.740.000
		Nilai AKIP PPPOMN	85	-	-	-	85	31.750.000
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	-	-	-	5	19.175.324.000
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	-	-	-	3,15	6.720.000

Capaian RAPK Kepala PPPOMN dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS pada menu *e-performance*. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Capaian RAPK Kepala PPPOMN ini menjadi masukan untuk melakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja.

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja seluruh indikator kinerja PPPOMN mengacu pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sesuai Keputusan BPOM tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di BPOM. Pengumpulan data kinerja PPPOMN dilakukan melalui aplikasi Sirendra (<https://sites.google.com/view/sirendra2>).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan rumus sebagai berikut:

Pengukuran indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam mengukur kriteria pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan kategori sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Setelah dilakukan untuk perhitungan capaian pada masing-masing Indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja

Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. **NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.** NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

Tabel 2.5.2 Predikat Kinerja Organisasi

Kriteria	NKO	Notifikasi Warna
ISTIMEWA	$>100\%$	
BAIK	$80\% < x \leq 100\%$	
BUTUH PERBAIKAN	$60\% < x \leq 80\%$	
KURANG	$20\% < x \leq 60\%$	
SANGAT KURANG	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk menentukan nilai capaian bila dibandingkan dengan target tahun berjalan disampaikan dengan kriteria sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/melampaui	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun, dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $> 100\%$	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun, dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - , 100\%$ ($70 > x < 100$)	

Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator s.d tahun , dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar < 70% (x<70%)	
-------------------	---	---

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut :

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

Tabel 2.5.3 Metode Pengukuran Kinerja PPPOMN

No.	Indikator Kinerja	Penanggungjawab Pengumpul Data	Metode Pengukuran
1.	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi	Widiyanto Kurniawan	Realisasi dihitung dari Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu

	dalam sesuatu jejaring secara terpadu		
2.	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	Neni Isnaeni	Nilai Rata-Rata dari 35 Laboratorium UPT berdasarkan tools
3.	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	Raisa Vonna Fatimah	Penjumlahan persentase penerapan digitalisasi dari 46 laboratorium BPOM berdasarkan tools (A) dibagi jumlah laboratorium BPOM = $A / 46$
4.	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	Arum Prasetyaningtyas	Dihitung berdasarkan jumlah laboratorium eksternal yang didampingi BPOM pada tahun N.
5.	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	Widya Sagita	Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium diukur melalui komponen a. capaian terhadap perencanaan sampling dan pengujian (30%) b. produktivitas pengujian (35%) c. responsivitas (5%) d. kapasitas (15%) e. sustainabilitas (15%)
6.	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	Diah Lestari & Innike Sintawatie Maulidiah	Nilai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dari penjumlahan dari seluruh Tingkat : Tingkat 5 = $(30\% \times \text{Nilai SKL Tingkat 5})$ Tingkat 4 = $(20\% \times \text{Rata-rata Balai Regional}) + (2,5\% \times \text{Rata-Rata UPT PPPOMN})$ Tingkat 3 = $(26,25\% \times \text{Rata-rata SKL Tingkat 3})$ Tingkat 2 = $(9,75\% \times \text{Rata-rata SKL Tingkat 2})$ Tingkat 1 = $(6,5\% \times \text{Rata-rata SKL Tingkat 1})$
7.	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Sri Utaminingsih	Realisasi dihitung dari banyaknya metode analisis yang dikembangkan mulai periode Renstra hingga periode pengukuran dibagi target akhir 2029 dikali 100%
8.	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Nurul Azizah	Realisasi dihitung dari banyaknya baku pembanding yang dikembangkan mulai periode Renstra hingga periode pengukuran dibagi target akhir 2029 dikali 100%
9.	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Hasna Nur Syahidah	Realisasi diperoleh dari hasil survei terhadap enam aspek layanan publik PPPOMN: 1. Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Profesionalitas SDM (18%) 3. Sarana Prasarana (15%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%) 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%)

			6. Inovasi (7%)
10.	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	Sri Purwaningsih	Realisasi diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama terhadap implementasi RB di PPOMN dalam pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
11.	Nilai AKIP PPOMN	Atika Aprillia Purnama & Dwi Susilowati	Realisasi diperoleh berdasar hasil evaluasi SAKIP terhadap lima komponen: 1. Perencanaan kinerja (24) 2. Pengukuran kinerja (24) 3. Pelaporan kinerja (12) 4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (20) 5. Capaian kinerja (20)
12.	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	Maisaroh	Realisasi dihitung dari penjumlahan (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Indikator pembentuk nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah: a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%) Indikator pembentuk nilai IKPA adalah: a. Revisi DIPA (bobot 10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) d. Belanja Kontraktual (bobot 10%) e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) g. Capaian Output (bobot 25%) h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
13.	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	Atiek Supardiati E.S.	Menggunakan kertas kerja pengukuran maturitas manajemen risiko

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi adalah suatu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan beberapa aspek diantaranya Kemampuan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal, Kemampuan menghasilkan output yang berkualitas, Kemampuan menyelesaikan tugas dan proyek tepat waktu.

Analisis akuntabilitas kinerja adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap sejauh mana sebuah organisasi atau individu telah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi terhadap kinerja untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar dan harapan yang ditetapkan. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan 2 tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW II	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN THDP TW II 2025	CAPAIAN THDP TARGET 2025	KRITERIA THDP CAPAIAN TAHUNAN
Sasaran Kegiatan 1. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan								
1	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42	20	%	20	100	47,62	 Perlu Upaya Keras
2	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40	Akhir tahun	%	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
3	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30	Akhir tahun	%	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
4	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4	Akhir tahun	Jumlah	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
5	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77	Akhir tahun	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium								
6	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	65,5	62,8	%	65,95	105,0	100,69	 Tercapai
7	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan	80,91	77,99	%	78,10	100,14	96,52	 Akan Tercapai

	pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan							
8	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04	76,48	%	76,61	100,17	95,71	 Akan Tercapai
Sasaran Kegiatan 3. Layanan Publik PPPOMN yang prima								
9	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7	Akhir tahun	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal								
10	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,59	Akhir tahun	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
11	Nilai AKIP PPPOMN	85	Akhir tahun	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
12	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	Akhir tahun	Nilai	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
13	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	Akhir tahun	Indeks	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Dari hasil pengukuran diatas dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria **Tercapai**, 2 (dua) Indikator Kinerja dengan kriteria **Akan Tercapai**, 1 (satu) Indikator Kinerja dengan kriteria **Perlu Upaya Keras** dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja penilaian dilaksanakan pada akhir tahun.

Pada triwulan II tahun 2025, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi periodik sebesar 101,33 dengan predikat "**Istimewa**" dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Periodik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN KINERJA
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	20	20	100	100
		Persentase pemenuhan laboratorium hijau	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	62,8	65,94	105,0	105,0
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	77,99	78,10	100,14	100,14
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	76,48	76,61	100,17	100,17
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Nilai AKIP PPPOMN	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	Akhir tahun	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Total Capaian PK	405,31
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)	101,33
Predikat NKO	Istimewa

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing Sasaran Kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN 1: MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

1. IK 1. Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara Terpadu

Laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu adalah kolaborasi dan integrasi antara laboratorium POM di semua tingkatan untuk memperkuat kapasitas dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan secara lebih efektif dan efisien. Implementasi Lab POM yang terintegrasi secara terstruktur dalam wadah jejaring, sehingga laboratorium POM akan mampu menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat. Laboratorium terintegrasi terdiri atas jejaring nasional dan internasional.

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu : $(72\% \times A) + (28\% \times B)$

A. Jejaring Nasional : $((a+b+c+d+e \text{ tahun } N) / (a+b+c+d+e \text{ 2025-2029}) \times 100\%$

Jejaring laboratorium POM yang dibentuk dengan melibatkan beberapa laboratorium Badan POM, lembaga pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta, terdiri atas 5 Jejaring :

1. Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI): jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))

2. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) : jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
3. Jejaring Laboratorium Pengujian Obat Bahan Alam (JLPOBA) : Jumlah kegiatan implementasi MA (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
4. Jejaring Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler (JLMBM) : Jumlah kegiatan implementasi MA yang dilaksanakan (penambahan 1 MA per tahun (2025-2029))
5. Jejaring Laboratorium Baku Pembanding (JPBAI) : jumlah kegiatan kolaborasi pengembangan baku pembanding (penambahan 1 BP per tahun (2025-2029))

B. Jejaring internasional : $((\text{realisasi } a+b+c+d+e+f \text{ tahun } N) / (\text{target } a+b+c+d+e+f \text{ 2025- 2029}) \times 100\%$

a = ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

b = ASEAN Cosmetics Testing Laboratory Committee (ACTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

c = ASEAN Testing Laboratory Committee (AFTLC): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

d = South-East Asia Regulatory Network (SEARN): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (2 partisipasi/pertemuan per tahun).

e = Tobacco Laboratory Network (Toblabnet): Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

f = GMFTN: Jumlah partisipasi/pertemuan yang diikuti secara aktif (1 partisipasi/pertemuan per tahun).

Target persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu adalah 42% yang harus dicapai di akhir tahun. Setelah pada TW I tahun 2025 belum dapat diukur pemenuhan laboratorium yang

terkoneksi dikarenakan beberapa kegiatan jejaring masih terkendala efisiensi anggaran, hampir semua kegiatan berproses di TW II. Rekapitulasi kegiatan jejaring terpadu di TW II di antaranya:

1. ACTLC meeting ke 24 tanggal 28-29 April 2025
2. SEARN second virtual meeting tanggal 24-4-2025
3. AFTLC ke-26, 10-11 April 2025
4. JLPOBA, Bimtek Pengujian dan Validasi-Verifikasi Kromatografi Lapis Tipis, 23 April 2025
5. JLKI :
 - a. Pembahasan Pembaruan Perjanjian Kerjasama tentang JejaringLaboratorium Kosmetik Indonesia bersama Biro KS dan Biro Hukor (2 Mei 2025)
 - b. Pembahasan RoV on ISO PWI 24913 and collated comments (27 Mei 2025)
 - c. Pembahasan Persiapan Uji Kolaborasi ISO PWI 24913 Dioksan antara PPPOMN sebagai Project Leader dengan Amerika sebaga Co Project pada
 - d. Finalisasi pembahasan perpanjangan PKS JLKI periode 2025 – 2029 dengan penambahan dua keanggotaan LPPOM MUI dan LST UI pada 19 Juni 2025
6. JLBP : Pembahasan PKS Percepatan Pengembangan Baku Pembanding tanggal 21 Mei 2025
7. JLPPI : Pertemuan Teknis JLPPI sdh dilaksanakan pada 26 Mei 2025
8. APTLC : 1st Meeting of Taskforce APTLC(27 Mei 2025)
9. GMFT : 22nd ASEAN GMFT Network Meeting sudah terlaksana 24-25 Juni 2025.

Sehingga capaian kinerja jejaring laboratorium obat dan makanan pada TW II dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja "Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara Terpadu	-	20	20	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Jika dibandingkan realisasi dan capaian kinerja antara TW I dan TW II maka diindikasikan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut didukung kegiatan jejaring yang telah mengalami progres selama TW II.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.4 Capaian Kinerja "Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu" terhadap target tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam suatu jejaring secara terpadu	42	20	47,62	 Perlu upaya keras

Capaian kinerja indikator pada TW II jika dibandingkan terhadap target akhir tahun sebesar 42% yaitu 47,62 dengan kriteria "Perlu Upaya Keras" karena belum memenuhi setengah dari yang diharapkan. Namun nilai 20% ini masih sesuai dengan perencanaan dan dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diharapkan di periode-periode berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini hingga TW II tahun 2025 di antaranya:

1. Penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator

- Komitmen Kelembagaan yaitu dukungan pimpinan dan institusi untuk memperkuat jejaring laboratorium, termasuk pengalokasian anggaran dan sumber daya.
- Standardisasi dan Akreditasi yaitu kapasitas laboratorium anggota jejaring telah memenuhi standar ISO/IEC 17025 serta penggunaan metode uji yang tervalidasi dan tersertifikasi secara nasional/internasional.
- Teknologi dan Infrastruktur yaitu adanya platform digital yang memungkinkan kegiatan pertemuan jejaring tanpa terbatas jarak dan waktu. Sistem digital juga mendukung pelaporan dan sharing knowledge antar laboratorium dapat berlangsung dengan efektif.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu tersedianya SDM laboratorium yang kompeten dan terlibat aktif dalam jejaring laboratorium.
- Koordinasi dan Kolaborasi yaitu terselenggaranya forum koordinasi dan komunikasi rutin antar laboratorium jejaring (misalnya melalui rapat koordinasi, workshop, dan sistem early warning).

2. Penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator

- Keterbatasan infrastruktur dan anggaran yaitu belum semua laboratorium memiliki alat dan fasilitas yang sesuai standar untuk jenis pengujian tertentu. Yang paling krusial adalah isu efisiensi anggaran di tahun 2025 yang berdampak terhadap terbatasnya anggaran operasional untuk pengujian, pengiriman sampel, dan pemeliharaan peralatan.
- Ketimpangan kapasitas antar laboratorium yaitu perbedaan signifikan antar laboratorium yang terlibat dalam suatu jejaring dalam hal kompetensi SDM, peralatan, dan ruang lingkup pengujian. Ketimpangan tersebut kerjasama dalam lingkup jejaring tidak berjalan efektif
- Sistem informasi tidak terintegrasi yaitu laboratorium belum terkoneksi dalam satu sistem secara nasional atau regional.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Agar kedepannya kegiatan jejaring dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka dapat diusulkan beberapa upaya di antaranya:

- Peningkatan anggaran dan dukungan institusi untuk pengembangan jejaring laboratorium pengujian.
- Adanya regulasi atau pedoman teknis (misal, Peraturan Kepala BPOM) yang memperkuat peran jejaring laboratorium.
- Intensifikasi pelatihan rutin, benchmarking, dan peningkatan kapasitas bagi laboran di seluruh jejaring.
- Digitalisasi dan integrasi sistem jejaring agar pelaporan, validasi, dan rujukan hasil pengujian berjalan efisien.
- Monitoring evaluasi dan audit jejaring berkala untuk mengidentifikasi celah dan memperbaiki kinerja kolektif laboratorium jejaring obat dan makanan.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja jejaring laboratorium tahun 2025 yaitu:

1. Kegiatan jejaring terlaksana sesuai perencanaan yang berupa pelatihan/workshop, pertemuan/Forum Group Discussion, dan persiapan uji kolaborasi/profisiensi.
2. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor yang baik sehingga menjadi kunci keberhasilan pencapaian indikator ini.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan data kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Capaian indikator ini sangat bermanfaat bagi PPPOMN untuk penyesuaian program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja.

2. IK 2. Persentase pemenuhan laboratorium hijau

Laboratorium hijau adalah Laboratorium yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam desain, operasional, serta pengelolaan sumber daya. Laboratorium hijau bertujuan untuk mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.

Asesmen *Green Laboratory* adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memastikan setiap unit telah menerapkan green lab untuk mendukung upaya berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Ruang Lingkup Asesmen terdiri atas:

- a. Konservasi Energi
- b. Konservasi Air
- c. Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan
- d. Sumber dan Siklus Material

Nilai Pemenuhan UPT terhadap Tools Penerapan Green Laboratory

Cara Perhitungan dan formula:

Jumlah laboratorium

UPT = 35 (34 BBPOM/Balai POM lama + Balai POM Ende)

Persentase pemenuhan laboratorium hijau = Nilai Rata-Rata dari 35 Laboratorium UPT

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.5 Capaian Kinerja "Persentase pemenuhan laboratorium hijau" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	-	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian kinerja indikator "Persentase pemenuhan laboratorium hijau" pada triwulan II tahun 2025 belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian “Persentase pemenuhan laboratorium hijau” dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.6 Capaian Kinerja “Persentase pemenuhan laboratorium hijau” terhadap Target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian kinerja indikator tahun 2025 terhadap target sebesar 40% belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dapat diukur pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada TW II, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Meskipun terdapat penyesuaian terkait efisiensi anggaran, hal tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan laboratorium hijau pada triwulan ini. Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Memasuki Triwulan III Tahun 2025, Tim *Green Laboratory* akan fokus pada dua agenda strategis sebagai kelanjutan dari hasil Lomba Penerapan *Green Laboratory*, yaitu:

1. Desk bimbingan kepada UPT dengan nilai penerapan *green laboratory* yang rendah.

Tim akan melaksanakan kegiatan desk bimbingan secara bertahap kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang pada tahap penyisihan Lomba Green Laboratory belum mencapai kategori Bronze. Bimbingan ini bertujuan untuk:

- Memberikan pemahaman mendalam terkait indikator-indikator *Green Laboratory*;
- Mengidentifikasi kendala penerapan yang dihadapi masing-masing UPT;
- Menyusun rencana aksi perbaikan yang aplikatif dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing laboratorium;
- Mendorong komitmen UPT untuk melakukan perbaikan berkelanjutan serta mempersiapkan diri untuk lomba atau asesmen berikutnya.

2. Tindak Lanjut Pembinaan Internal PPPOMN menuju Sertifikasi My Green Lab (MGL)

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan laboratorium hijau secara konkret dan berskala internasional, Tim *Green Laboratory* akan melanjutkan proses pembinaan internal di PPPOMN untuk memenuhi standar sertifikasi dari My Green Lab (MGL) – USA.

Kedua agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya keberlanjutan di lingkungan laboratorium BPOM, mendorong perbaikan menyeluruh secara bertahap, dan menjadikan PPPOMN sebagai laboratorium percontohan nasional yang tersertifikasi secara internasional dalam penerapan *Green Laboratory*.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW II tahun 2025 yaitu:

- Penilaian penerapan *green laboratory* UPT BPOM
- Pembahasan penetapan mekanisme penilaian tahap visitasi pada 2 dan 14 Mei 2025

- Pengumuman 10 UPT nominator terbaik dan 3 inisiatif terbaik pada tanggal 5 Mei 2025
- Visitasi ke 5 UPT nominator dengan nilai tertinggi penerapan *green laboratory*
- Kegiatan *Green Laboratory Forum and Awards BPOM* pada 26 Juni 2025 di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika, BPOM.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator ini dapat memberikan gambaran awal mengenai penerapan laboratorium hijau di UPT BPOM. Informasi ini sangat bermanfaat bagi PPPOMN dan UPT BPOM dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran, guna memastikan bahwa alokasi sumber daya mendukung pencapaian output yang direncanakan.

3. IK 3. Persentase implementasi digitalisasi laboratorium

Digitalisasi Laboratorium adalah integrasi teknologi dan alat digital ke dalam pengaturan laboratorium (yang telah ada) untuk meningkatkan dan merampingkan berbagai proses. Transformasi ini melibatkan penggunaan perangkat digital, perangkat lunak, dan sistem manajemen data, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kolaborasi dalam pengujian, pengembangan pengujian.

Beberapa lingkup digitalisasi laboratorium :

- a. Pengelolaan Sampel
- b. Pengelolaan Instrumen/alat laboratorium
- c. Pengelolaan inventory (Reagen, Media, Suku Cadang, Baku Pembanding, bahan habis pakai lain)
- d. Pengelolaan Metode
- e. Pengelolaan Data Uji
- f. Pengelolaan Dokumen Mutu dan Rekaman
- g. Pelaporan
- h. Ketertelusuran
- i. Pelayanan Publik
- j. Organisasi/Pengelolaan SDM

k. Automasi Instrumen

Laboratorium digitalisasi Badan POM adalah laboratorium yang sudah melakukan pengujian / pengembangan metode yang hasilnya berupa sertifikat pengujian / metode analisis yang telah disahkan.

Jumlah laboratorium :

UPT = 42 (34 BBPOM/Balai POM lama + 8 Balai POM baru)

Pusat = 4 (PPPOMN + 3 UPT)

Persentase penerapan digitalisasi laboratorium di laboratorium BPOM = penjumlahan persentase penerapan digitalisasi dari 46 laboratorium BPOM berdasarkan tools (A) dibagi jumlah laboratorium BPOM

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.7 Capaian Kinerja "Persentase implementasi digitalisasi laboratorium" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase penerapan digitalisasi laboratorium	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian kinerja indikator "Persentase implementasi digitalisasi laboratorium" pada triwulan II tahun 2025 belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian "Persentase implementasi digitalisasi laboratorium" dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.8 Capaian Kinerja "Persentase implementasi digitalisasi laboratorium" target tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase penerapan digitalisasi laboratorium	30	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian kinerja indikator "Persentase implementasi digitalisasi laboratorium" tahun 2025 terhadap target sebesar 30% belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator pada Triwulan II telah terlaksana sesuai dengan rencana. Tidak terdapat kendala atau hambatan signifikan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Tim Digitalisasi Laboratorium melanjutkan langkah strategis dengan melakukan koordinasi lanjutan bersama Pusdatin BPOM, khususnya terkait pengembangan fitur baku pembandingan dan reagensia dalam sistem digital laboratorium.

Selain itu, tim digitalisasi juga telah melaksanakan pembahasan bersama narasumber dalam rangka penyusunan pedoman digitalisasi laboratorium yang komprehensif dan aplikatif. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pematangan kebijakan dan arah teknis implementasi digitalisasi ke depan.

Keberhasilan capaian pada Triwulan II ini didukung oleh koordinasi dan komitmen tim digitalisasi, serta dukungan teknis dari para narasumber yang kompeten di bidangnya. Meskipun indikator kinerja belum dapat diukur secara kuantitatif hingga akhir tahun 2025, langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada TW II memperkuat fondasi implementasi dan meningkatkan peluang pencapaian target indikator sesuai yang telah ditetapkan.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai tindak lanjut Tim Digitalisasi merencanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut:

1. Membuat kajian yang mencakup fitur aplikasi digitalisasi laboratorium secara umum serta kemungkinan proses integrasi
2. Pembahasan pedoman kajian dengan Pusdatin BPOM serta para ahli yang kompeten dibidangnya
3. Pembuatan *tools assesment* implementasi digitalisasi laboratorium
4. Sosialisasi dan implentasi tools digitalisasi laboratorium
5. Pembahasan hasil *assesment* digitalisasi laboratorium
6. Pemeliharaan dan usulan peningkatan LIMS di PPPOMN

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan digitalisasi laboratorium pada triwulan II didukung oleh kelanjutan program strategis yang telah dirintis sejak Triwulan I.

Pada triwulan II, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan substansi teknis dan penyusunan pedoman implementasi yang lebih operasional. Langkah-langkah yang dilakukan memberikan kontribusi nyata terhadap pemantapan fondasi program digitalisasi laboratorium di lingkungan BPOM.

Salah satu kegiatan yang menonjol pada TW II adalah koordinasi lanjutan antara Tim Digitalisasi PPPOMN dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BPOM, khususnya dalam hal pembahasan fitur digitalisasi untuk Baku Pembanding dan Reagensia. Fitur ini merupakan elemen penting dalam manajemen laboratorium modern, karena berkaitan langsung dengan akurasi hasil uji dan efisiensi proses pengujian. Diskusi ini menjadi bagian dari upaya integrasi sistem digital yang lebih komprehensif dan fungsional.

Selain itu, telah dilakukan pembahasan bersama tenaga ahli, yang mencakup aspek teknologi informasi, manajemen mutu laboratorium, serta kebijakan sistem informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman digitalisasi laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan aktual di berbagai UPT, serta selaras dengan kebijakan BPOM.

Seluruh program yang dijalankan pada Triwulan II tidak hanya bersifat penguatan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai sarana konsolidasi lintas unit dalam mendorong sinergi implementasi digitalisasi. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan terencana, program/kegiatan yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian target indikator di akhir tahun, serta memperkuat kesiapan pelaksanaan digitalisasi secara lebih luas dan terstruktur.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator pada program digitalisasi laboratorium memberikan gambaran awal mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan dan kontribusi terhadap target organisasi. Informasi ini sangat bermanfaat bagi PPPOMN dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran secara lebih tepat sasaran, guna memastikan bahwa alokasi sumber daya mendukung pencapaian output yang direncanakan.

Selain itu, data kinerja menjadi dasar dalam proses evaluasi pencapaian keberhasilan, termasuk tindak lanjut terhadap rekomendasi dan rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat untuk pengendalian internal dan perbaikan berkelanjutan.

4. IK 4. Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan sesuai standar

Laboratorium eksternal adalah laboratorium diluar Badan POM yang memiliki ruang lingkup pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Laboratorium eksternal termasuk perguruan tinggi sangat diperlukan untuk mendukung pengawasan dan atau memenuhi kebutuhan Industri termasuk UMKM Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam pemastian keamanan dan mutu produknya. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Sediaan Farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Peluang pengujian sediaan farmasi yang dapat dilakukan oleh laboratorium eksternal mencakup pengujian dengan tingkat kesulitan tinggi. Kemampuan melakukan pengujian Sediaan Farmasi dibuktikan melalui keikutsertaan uji profisiensi /uji kolaborasi dan/pengujian Sediaan Farmasi sesuai dengan ruang lingkup rekognisi oleh Badan POM. Kegiatan yang dilakukan yaitu verifikasi kesesuaian dengan pedoman/juknis BPOM dan kegiatan pendampingan untuk ruang lingkup parameter uji yang akan di rekognisi.

Cara perhitungan:

Jumlah laboratorium eksternal yang telah didampingi dan mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar dengan parameter yang telah ditetapkan dihitung berdasarkan jumlah laboratorium eksternal yang didampingi BPOM pada tahun N. Target pendampingan 20 laboratorium selama periode renstra atau 4 laboratorium setiap tahun.

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.9 Capaian Kinerja "Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Jumlah Laboratorium Eksternal Yang Mampu Melakukan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Sesuai Standar	-	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian kinerja indikator "Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar" pada triwulan II tahun 2025 belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian “Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar” dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.10 Capaian Kinerja “Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar” TW II terhadap Target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Jumlah Laboratorium Eksternal yang Mampu Melakukan Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Sesuai Standar	4	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian realisasi indikator “Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar” tahun 2025 terhadap target sebesar 4 belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada TW II, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendampingan peningkatan kemampuan laboratorium Eksternal pada triwulan II tidak terlepas dari penyusunan perencanaan program yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja. Salah satu faktor utama adalah merencanakan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program pendampingan laboratorium eksternal. Sosialisasi dan penilaian *self asesmen* sesuai *tools* kemampuan laboratorium, serta pendampingan dalam menindaklanjuti tindakan perbaikan (CAPA) menjadi tahapan krusial dalam memastikan program berjalan sesuai dengan rencana.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator pada program pendampingan laboratorium eksternal memberikan gambaran awal mengenai sistem manajemen mutu di laboratorium Eksternal yang dilakukan pendampingan oleh PPPOMN. Diharapkan laboratorium tersebut mendapatkan pengakuan oleh Badan POM sesuai standar yang telah ditetapkan sebagai laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. IK 5. Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium

Regionalisasi Laboratorium adalah pengelompokan laboratorium BPOM berdasarkan kedekatan letak geografis, moda transportasi, dan kemampuan pengujian. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 100 Tahun 2025 tentang regionalisasi laboratorium BPOM, Laboratorium UPT BPOM dikelompokkan menjadi 8 regional yaitu regional Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Manado, Makassar, Surabaya dan Jayapura. Kondisi yang diharapkan dengan adanya regionalisasi laboratorium yaitu agar BPOM dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan sumber daya sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan *post market* melalui pengujian laboratorium.

Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium diukur melalui komponen:

- a. Capaian terhadap perencanaan sampling dan pengujian
- b. Produktivitas pengujian
- c. Responsivitas
- d. Kapasitas
- e. Sustainability

Cara Perhitungan dan formula:

$$\text{Nilai efektivitas regionalisasi laboratorium} = (30\% \times a) + (35\% \times b) + (5\% \times c) + (15\% \times d) + (15\% \times e)$$

Kriteria Efektivitas

Nilai (%)	Kriteria	Deskripsi	Keterangan
≥ 90	Efektif	Regionalisasi Laboratorium dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian dan memberikan dampak bagi kinerja BPOM	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan dengan peningkatan berkelanjutan
70-89	Cukup Efektif	Regionalisasi Laboratorium cukup dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian, perlu intervensi Unit Kerja Pusat terkait dan Koordinator Region	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan, perlu perbaikan tidak mendasar
< 70	Kurang Efektif	Regionalisasi Laboratorium kurang dapat diandalkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas pengujian, perlu intervensi pimpinan yang terkait	Sistem Regionalisasi dapat dilanjutkan, perlu perbaikan Mendasar

Selain pengukuran efektivitas menggunakan indikator di atas, Pokja Kajian Strategis juga perlu melakukan analisis efisiensi dan analisis tren perkembangan capaian dari tahun ke tahun, serta mendalami hal-hal khusus yang berpengaruh terhadap implementasi regionalisasi laboratorium secara

keseluruhan. Faktor yang berpengaruh tersebut dapat mencakup kebijakan dan SOP, pola pembagian tugas dan klasterisasi, pola distribusi personil, dan sebagainya. Hasil analisis diharapkan dapat memberi gambaran kondisi saat serta menjadi dasar pijakan untuk perbaikan ke depan.

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.11 Capaian Kinerja "Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Menguatnya laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	Indikator baru	-	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Pada triwulan II tahun 2025 belum ditargetkan "Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium" karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian "Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium" dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.12 Capaian Kinerja "Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium" terhadap Target 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77	Akhir tahun	Akhir tahun	-

Capaian realisasi indikator "Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium" tahun 2025 terhadap target sebesar 77 belum dapat

dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Secara umum, kegiatan untuk mendukung indikator telah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada TW II, tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator tersebut. Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025. Namun, adanya efisiensi anggaran di UPT BPOM, berpotensi akan mempengaruhi capaian indikator nilai efektivitas reglab

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai tindak lanjut kegiatan pada Triwulan II, Tim Regionalisasi Laboratorium mengusulkan beberapa kegiatan pendampingan pengujian obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, mikrobiologi dan biologi molekuler secara daring ke balai regional.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW II tahun 2025 yaitu:

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Regionalisasi Laboratorium TW I tahun 2025
- Pendampingan Pengujian untuk masing-masing Regional secara daring bulan April - Juni 2025

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi pada laporan kinerja ini sesuai/relevan dengan tupoksi PPPOMN dalam organisasi Badan POM dan menjawab tantangan serta mendukung pencapaian visi dan misi organisasi dan suprasistem. Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA LABORATORIUM BPOM SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

6. IK 6. Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

Jumlah komponen pemenuhan SKL sesuai dengan tingkatan Laboratorium. Pemenuhan Laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan penjumlahan pemenuhan SKL setiap tingkatan Laboratorium. dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Tingkat 5 = $(30\% \times \text{Nilai Pemenuhan SKL Tingkat 5})$

Tingkat 4 = $(20\% \times \text{Rata-rata Balai Regional}) + (2,5\% \times \text{Rata-rata masing-masing UPT PPPOMN: BPKOM, BPPB, Balai Kalibrasi})$

Tingkat 3 = $(26,25\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 3})$

Tingkat 2 = $(9,75\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 2})$

Tingkat 1 = $(6,5\% \times \text{Rata-rata nilai pemenuhan SKL Tingkat 1})$

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.13 Capaian Kinerja "Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium		62,8	65,95	105,0	 SANGAT BAIK

Dari target Nilai SKL BPOM TW II tahun 2025 sebesar 62,8% terealisasi sebesar 65,95% sehingga capaiannya adalah 105,0% dengan kategori sangat baik.

Realisasi sebesar 62,8% merupakan Nilai SKL BPOM yang dihitung berdasar penjumlahan pemenuhan SKL setiap tingkatan dengan perhitungan:

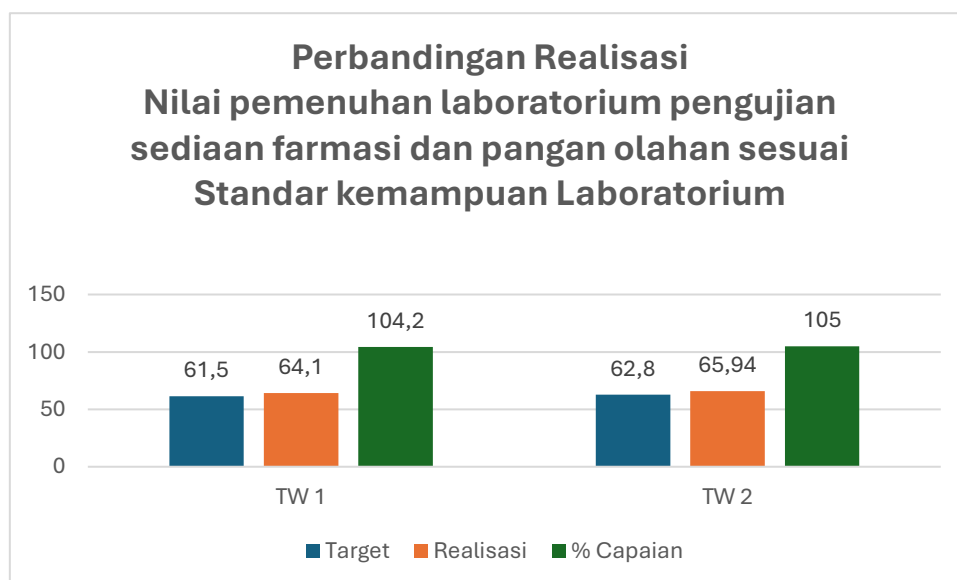
$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= (30\% \times 79,9\%) + (20\% \times 75,7\%) + (2,5\% \times 79,47\%) + (2,5\% \times \\ &\quad 90,03\%) + (2,5\% \times 89,37\%) + (26,25\% \times 71,1\%) + \\ &\quad (9,75\% \times 10,37\%) + (6,5\% \times 10,49\%) \\ &= 65,94\% \end{aligned}$$

sedangkan untuk capaian TW II sebesar 105,0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian TW II} &= (65,94 / 62,8) \times 100\% \\ &= 105,0\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Capaian kinerja pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada TW II ini mengalami peningkatan sebanyak 0,8% jika dibandingkan dengan capaian pada TW I.



Gambar 3.1.1 Perbandingan Realisasi Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.14 Capaian Kinerja "Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" terhadap target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	65,5	65,95	100,69	 TERCAPAI

Realisasi kinerja indikator kinerja "Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" pada TW II tahun 2025 sebesar 65,95% dengan target tahunan sebesar 65,5% sehingga capaian indikator kinerja TW II terhadap target Tahun 2025 sebesar 100,69% dengan kategori Tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya kinerja :

1. Monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium dilakukan per Triwulan, sehingga bila ada kendala dapat segera ditindaklanjuti kendala tersebut.
2. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup pengujian melalui verifikasi metode analisis, uji profisiensi.
3. Terpenuhinya peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi.
4. Terlaksananya peningkatan kompetensi sesuai penugasan pengujian.
5. Terlaksananya verifikasi metode analisis oleh laboratorium.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan terus dilakukan PPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja "Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium" antara lain melalui :

- Peningkatan cakupan ruang lingkup pengujian sesuai tantangan Pengawasan.
- Peningkatan kompetensi SDM Penguji sesuai dengan perkembangan teknologi produksi Obat dan Makanan dan isu aktual Obat dan makanan.
- Melakukan intervensi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai dengan pendampingan intensif.
- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi peralatan laboratorium.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja “Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” antara lain :

- Workshop Pengujian Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.
- Pelatihan pengujian Unggul di laboratorium Regional.
- Pengembangan metode analisis, pengembangan baku pembanding, pengujian sampel Obat dan Makanan (obat, bahan obat, NAPPZA, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, dan rokok) serta kalibrasi alat laboratorium.
- Program peningkatan kompetensi SDM Penguji melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Program pelaksanaan verifikasi metode analisis di BB/Balai POM.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan data kinerja dalam organisasi atau instansi pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan. Capaian indikator pada “Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan mengenai kemampuan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan di BPOM. Diharapkan laboratorium pengujian tersebut dapat memenuhi standar sesuai SKL yang telah ditetapkan.

7. IK 7. Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Metode analisis (MA) adalah metode pengujian yang dikembangkan oleh PPPOMN, yang digunakan untuk pengujian kimia obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, mikrobiologi dan biologi molekuler.

Yang dimaksud dengan kebutuhan adalah banyaknya metode analisis kimia dan biologi sesuai kebutuhan pengawasan hingga tahun 2029. Jumlah MA yang sudah dikembangkan oleh PPPOMN hingga tahun 2024 adalah 2213. Jumlah tersebut termasuk 75 MA yang dikembangkan oleh Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) sebagai UPT di Lingkungan PPPOMN. Jumlah MA yang digunakan sebagai baseline PPPOMN pada periode Renstra 2025-2029 mengalami pengurangan sebanyak 75 MA menjadi 2138 karena BPPB saat ini sudah menjadi Satker mandiri. Berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan, jumlah MA yang dikembangkan ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 134 MA per tahun. Kebutuhan MA hingga 2025 adalah sebanyak 2.272 MA. Di tahun 2026 menjadi 2.406 MA, tahun 2027 menjadi 2.504 MA, tahun 2028 menjadi 2.674 MA, dan target MA sampai dengan akhir periode renstra tahun 2029 adalah 2.808 MA.

a. Capaian Kinerja terhadap Target Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3.1.15 Capaian Kinerja Persentase Metode Analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	100	77,99	78,10	100,14	 SANGAT BAIK

Jumlah MA yang dikembangkan sampai dengan TW II tahun 2025 sebanyak 55 MA terdiri dari:

- MA pengujian kimia obat, bahan obat, NAPPZA (KOBONAPPZA) = 16 MA
- MA pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan (OTOKSK) = 8 MA
- MA pengujian kimia kosmetik = 7 MA
- MA pengujian pangan olahan = 13 MA
- MA pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler (MBM) termasuk BSL 3 = 11 MA

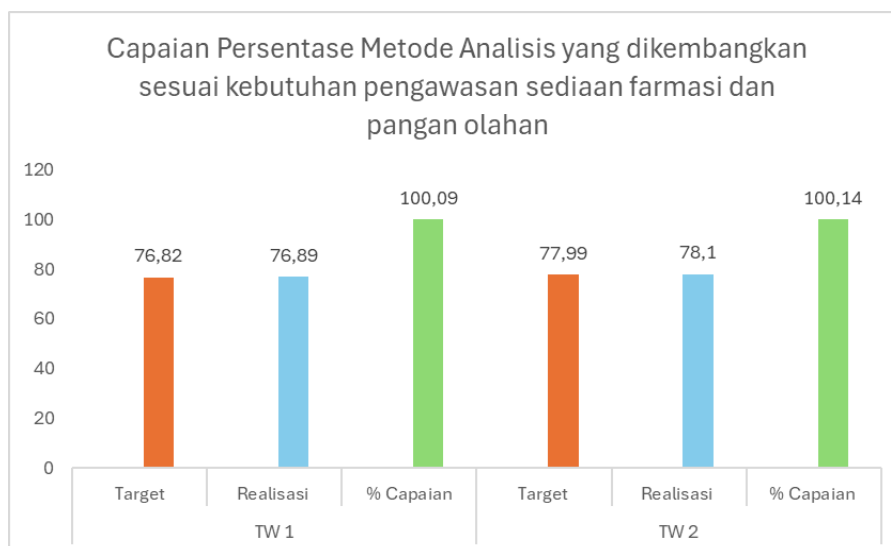
Perhitungan realisasi MA yang dikembangkan hingga TW II yaitu sebagai berikut:

$$= \frac{(2138 \text{ (capaian hingga tahun 2024)} + 55 \text{ (capaian TW I Tahun 2025)})}{2808 \text{ (target periode akhir Renstra)}} = 78,10\%$$

Capaian indikator kinerja “Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan” dihitung dengan cara membandingkan realisasi pada TW II terhadap target indikator kinerja TW II tahun 2025, sehingga diperoleh hasil capaian 100,14% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,05% jika dibandingkan dengan capaian TW I.



Gambar 3.1.2 Capaian Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.16 Capaian Kinerja "Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" terhadap Target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91	78,10	96,52	 AKAN TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja indikator "Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" pada TW II jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yaitu 96,52% dengan kriteria "Akan Tercapai".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

- PPPOMN memiliki dokumen perencanaan pengembangan metode analisis yang disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, yaitu:

- Usulan dari Kedeputian terkait, Balai Besar/Balai POM, maupun Stakeholder untuk kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - Terbitnya peraturan baru terkait persyaratan keamanan, manfaat dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan.
 - Pembaharuan/revalidasi metode analisis dengan metode yang lebih sensitif karena perubahan persyaratan dalam peraturan. Sebagai alternatif/pilihan metode analisis terhadap pengujian dasar yang telah ada.
- Tersedianya reagen, baku pembanding, suku cadang, bahan fungsional untuk pengembangan MA.
 - Tersedianya SDM yang memadai dan kompeten untuk melakukan pengembangan metode analisis.
 - Tersedianya peralatan laboratorium yang memiliki kinerja baik untuk pengembangan metode analisis.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

PPPOMN terus melakukan berbagai upaya untuk menjawab tantangan pengawasan dengan meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengembangan metode analisis Obat dan Makanan pada periode Renstra tahun 2025-2029. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

- Penyesuaian perencanaan sesuai skala prioritas terhadap isu terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Mengidentifikasi dan memastikan ketersediaan sarana prasarana pendukung pengujian, seperti instrumen laboratorium, baku pembanding, reagen, bahan fungsional, dll sebelum dilaksanakannya pengembangan metode analisis.
- Mengidentifikasi metode analisis terkini yang dapat diterapkan dalam pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Peningkatan kompetensi SDM Penguji melalui bimbingan teknis, workshop, pelatihan, training, seminar baik teori maupun praktik di laboratorium, baik teknis pengujian maupun sistem manajemen mutu.
- Pengadaan sarana prasarana pengujian untuk mengembangkan metode analisis seperti instrumen laboratorium, bahan fungsional, reagen, baku pembanding, dan sampel.
- Pemeliharaan dan kalibrasi instrumen laboratorium, baik peralatan utama maupun pendukung tepat waktu sesuai perencanaan.
- Pertemuan pembahasan hasil verifikasi dan hasil validasi metode analisis bersama Tenaga Ahli dan Direktorat Pengawasan terkait.
- Evaluasi/konsultasi/koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian.
- Penerapan sistem mutu di laboratorium.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Data hasil laporan kinerja pada TW II memberikan informasi terlaksananya rencana kinerja yang sudah ditetapkan sampai dengan TW II untuk IKU persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Capaian terhadap target akhir tahun belum tercapai, sehingga PPPOMN perlu memastikan pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja dan memonitoring faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan baku pembanding, media, reagen, suku cadang, alat sehingga tidak menghambat proses pengembangan MA.

8. IK 8. Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Baku Pembanding (BP) terdiri dari Baku Pembanding Kimia dan Baku Pembanding Mikroba dalam bentuk kering. Baku Pembanding Kimia adalah Baku Pembanding yang dikembangkan/diproduksi kembali dan dilakukan uji

ulang/stabilitas oleh PPPOMN dan Balai Besar POM di Yogyakarta. Baku Pembanding Mikroba adalah Baku Pembanding yang diproduksi kembali/dikembangkan oleh PPPOMN. Baku Pembanding yang ditetapkan adalah Baku Pembanding kimia dan mikroba yang diperlukan untuk pengujian dalam rangka pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan hingga tahun 2029 yaitu sebanyak 1633.

- a. Jumlah BP yang ditetapkan pada tahun berjalan sesuai kebutuhan = Jumlah Sertifikat BP yang diterbitkan PPPOMN hingga tahun berjalan;
- b. Target Jumlah Sertifikat baku pembanding yang diterbitkan hingga tahun 2029 (kumulatif) = 1633 sertifikat;
- c. Target kumulatif penerbitan sertifikat baku pembanding hingga tahun 2029 ditetapkan sebanyak 1.633 sertifikat, dengan rincian tahunan sebagai berikut: 1.307 sertifikat pada tahun 2025, 1.387 sertifikat pada tahun 2026, 1.468 sertifikat pada tahun 2027, 1.550 sertifikat pada tahun 2028, dan mencapai 1.633 sertifikat pada tahun 2029.

Indikator persentase baku pembanding (BP) yang ditetapkan sesuai kebutuhan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah baku pembanding yang telah diterbitkan hingga tahun berjalan dengan target kumulatif jumlah baku pembanding yang seharusnya diterbitkan pada tahun tersebut dikali 100%.

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.17 Capaian Kinerja "Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	76,48	76,61	100,17	 SANGAT BAIK

Capaian realisasi indikator kinerja "Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan" triwulan II tahun 2025 termasuk kategori baik, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Baku pembandingan yang dikembangkan sesuai Kebutuhan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan = $a/b \times 100\%$

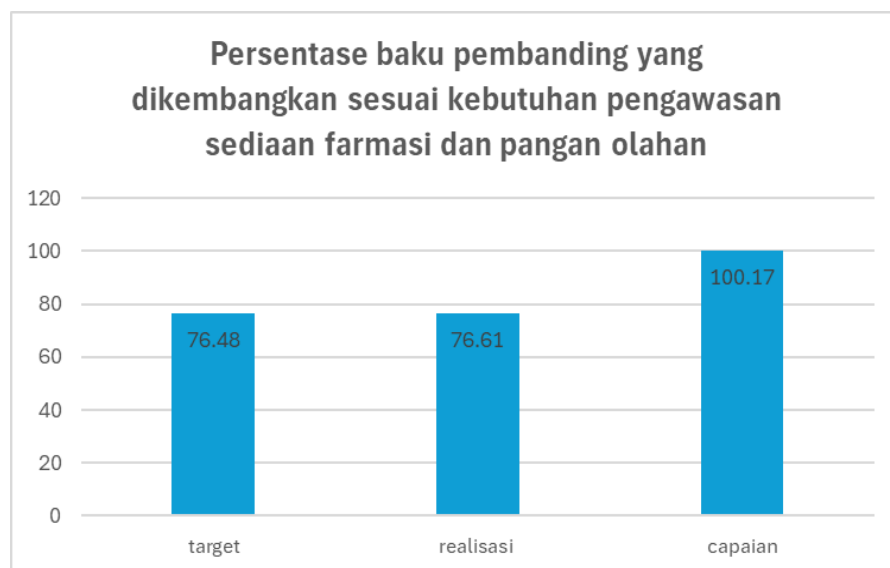
Realisasi = $1245 / 1633 \times 100\%$

Realisasi = 76,24%

Keterangan:

- Jumlah Sertifikat BP yang diterbitkan PPPOMN hingga tahun berjalan
- Target Jumlah Sertifikat baku pembandingan yang diterbitkan hingga tahun 2029 (kumulatif) = 1633 sertifikat

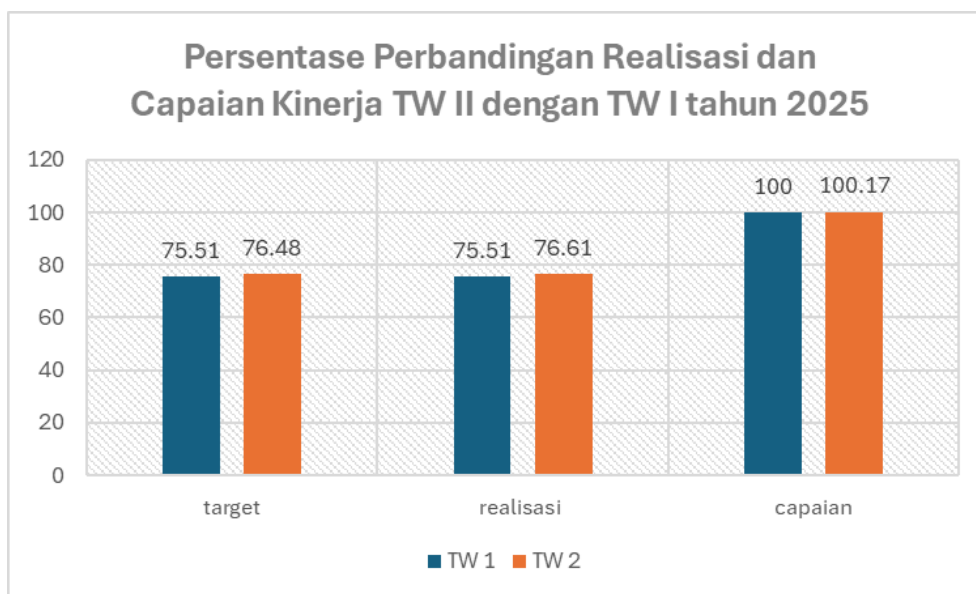
Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka capaian realisasi indikator kinerja tahun 2025 “Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan” adalah sebesar 100,17% dengan kategori **Sangat baik**.



Gambar 3.1.3 Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Terdapat peningkatan capaian sebanyak 0,17% jika dibandingkan dengan capaian TW I.



Gambar 3.1.4 Persentase Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I Tahun 2025

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.1.18 Capaian Kinerja "Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan" terhadap target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	80,04	76,61	95,72%	 AKAN TERCAPAI

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja indikator "Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" pada TW II jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2025 yaitu 94,33% dengan kriteria "Akan Tercapai".

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Indikator "Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan" menunjukkan capaian positif yang didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Ketersediaan bahan baku dan baku primer yang mencukupi menjadi pendorong kelancaran proses, didukung oleh pengadaan yang tepat

waktu, baik untuk bahan utama, reagen, maupun komponen pendukung lainnya. Seluruh tahapan uji juga berjalan selaras dengan jadwal pengembangan yang telah ditetapkan.

- Dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional turut memastikan proses pengembangan berjalan efektif. Tim yang terlibat memiliki kualifikasi serta kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan teknis.
- Fasilitas laboratorium yang memadai, termasuk peralatan yang mendukung kegiatan pengujian, juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

PPPOMN perlu terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengembangan baku pembanding pada periode Renstra tahun 2025-2029 untuk menjawab tantangan pengawasan. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

- Perencanaan pengembangan baku pembanding dengan pertimbangan tuntutan kebutuhan pengawasan obat dan makanan, kasus pelanggaran Obat dan Makanan sebagai dampak perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup/*lifestyle* dan adanya *new emerging disease*. Jika terdapat isu aktual Obat dan Makanan yang pengawasannya diprioritaskan, maka pengembangan baku pembanding akan menjadi prioritas dan dilakukan penyesuaian perencanaan sesuai skala prioritas.
- Monitoring dan evaluasi capaian baku pembanding yang ditetapkan dilakukan setiap bulan sehingga akan segera terlihat jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut.

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berbagai upaya dilakukan PPPOMN untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja “Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan” antara lain:

- Perencanaan jangka menengah pengembangan baku pembanding tahun 2025-2029 berupa roadmap target pengembangan baku pembanding yang akan dicapai setiap tahun.
- Monitoring dan evaluasi capaian baku pembanding yang ditetapkan dilakukan setiap bulan sehingga akan segera terlihat jika ada kendala dan segera dilakukan tindak lanjut.
- Melakukan kajian pada akhir tahun 2024 mengenai metode pengujian untuk pengembangan Baku Pembanding yang direncanakan akan dikembangkan pada tahun 2025 bersama tenaga ahli.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan dan triwulan sangat membantu dalam memantau capaian target dari indikator “Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan”, dimana dapat mengantisipasi dan melakukan revisi terkait anggaran dan target tahunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN 3: LAYANAN PUBLIK PPPOMN YANG PRIMA

9. IK 9. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (30%)
- Profesionalitas SDM (18%)
- Sarana Prasarana (15%)
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)
- Konsultasi dan Pengaduan (15%)
- Inovasi (7%)

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.1.19 Capaian Kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW I 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Layanan Publik PPPOMN yang Prima	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,97	-	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Pada triwulan II tahun 2025 belum ditargetkan nilai "Indeks Pelayanan Publik PPPOMN" karena pengukurannya di akhir tahun. Namun demikian selama triwulan II tahun 2025 PPPOMN telah melakukan banyak aktivitas untuk meningkatkan layanan publik PPPOMN.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat belum adanya nilai "Indeks Pelayanan Publik PPPOMN" pada triwulan I dan II tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan, dan akan diukur pada akhir tahun.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.10 Capaian kinerja "Indeks Layanan Publik PPPOMN" terhadap Target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,7	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian realisasi indikator tahun 2025 terhadap target sebesar 4,7 belum dapat dievaluasi karena pada TW II belum dilakukan pengukuran output.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja terus dilakukan PPPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja “Indeks Pelayanan Publik PPPOMN” hingga triwulan II, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pelayanan yang konsisten
2. Meningkatkan dan memelihara kompetensi petugas layanan;
3. Meningkatkan kenyamanan dan kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik;
4. Pemantauan aplikasi INFALABS dan memastikan sistem informasi pelayanan publik berjalan dengan baik;
5. Melayani dan menindaklanjuti konsultasi dan pengaduan;
6. Pengembangan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk pelayanan di PPPOMN

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian kinerja indikator “Indeks Pelayanan Publik PPPOMN”, beberapa aktivitas telah dilakukan PPPOMN hingga triwulan II tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kompetensi dan perilaku petugas layanan publik, serta dilakukan penilaian petugas layanan per TW dan pemberian apresiasi terhadap petugas layanan melalui penyerahan Service Excellent Certificate per TW.
2. Tindak lanjut atas layanan konsultasi dan pengaduan dilakukan secara periodik yaitu per triwulan. Semua permohonan Layanan Konsultasi dan Pengaduan disampaikan oleh pelanggan telah ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik
3. Pelayanan pelatihan yang diberikan oleh PPPOMN tidak hanya untuk masyarakat dalam negeri tetapi juga luar negeri. Pada TW II ini

PPPOMN menerima peserta pelatihan dari National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) Malaysia.

4. Melakukan *update* layanan informasi publik PPPOMN secara berkala diberbagai media yang mudah diakses oleh stakeholder.
5. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala dan penyampaian hasil survey di media sosial secara terbuka dan mudah diakses serta melakukan tindak lanjut atas saran dan masukan dari pelanggan.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan dan triwulan sangat membantu dalam memantau capaian target dari indikator 'Indeks pelayanan publik PPPOMN', dimana dapat mengantisipasi dan melakukan revisi terkait anggaran dan target tahunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN 4: TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

10. IK 10. Nilai Pembangunan ZI PPPOMN

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Pembangunan ZI di Badan POM mengacu pada PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 289 tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penilaian implementasi ZI di PPPOMN dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yaitu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan POM untuk melakukan evaluasi/penilaian, pemantauan dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja yang sedang membangun ZI. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat atas pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM tahun 2024 pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam Surat No. B- PI.06.06.7.11.24.612, menunjukkan bahwa Hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar 91,27, dengan komponen sebagai berikut :

1. Bobot komponen pengungkit:

- Manajemen Perubahan: 7,17%
- Penataan Tatalaksana: 6,00 %
- Penataan Sistem Manajemen SDM: 8,90%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja: 9,22%
- Penguatan Pengawasan: 13,04%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: 9,49%

2. Bobot komponen hasil:

- Birokrasi bersih dan akuntabel: 20,86
- Nilai survei persepsi korupsi: 17,11
- Capaian kinerja lebih baik: 3,75
- Pelayanan publik yang prima: 16,58
- Nilai persepsi kualitas pelayanan (IPP): 16,58

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.11 Capaian Kinerja "Nilai Pembangunan ZI PPPOMN" TW II

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91,27	Akhir Tahun	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian kinerja indikator “Nilai Pembangunan ZI PPPOMN” pada triwulan II tahun 2025 belum dapat dievaluasi karena pengukuran realisasi dan capaian dilakukan pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian “Nilai Pembangunan ZI PPPOMN” dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.12 Capaian Kinerja “Nilai Pembangunan ZI PPPOMN” terhadap target tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	91.59	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian realisasi indikator tahun 2025 terhadap target sebesar 91.59% belum dapat dievaluasi karena pada TW II belum dilakukan pengukuran output.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Sebanyak 24 (dua puluh empat) dari 30 (tiga puluh) unit kerja di Badan POM pusat tidak tercapai target Indeks RB tahun 2024. Adapun beberapa hal yang menyebabkan Indeks RB PPPOMN, tidak tercapai adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaduan pada Unit Kerja yang ditindaklanjuti oleh APIP.
2. Pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder belum dilakukan secara berkala.
3. Belum dilakukan monev terkait kendala atas perencanaan pembangunan ZI yang belum dilaksanakan.

4. Telah terdapat inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja namun belum memanfaatkan terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM.
5. Penempatan pegawai hasil rekrutmen belum terlihat telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan serta belum dilakukan monev atas penempatan pegawai rekrutmen.
6. Belum terdapat matriks mutasi pegawai antar jabatan yang memperhatikan kompetensi jabatan.
7. Belum terdapat matriks realisasi pelaksanaan diklat dan pengembangan kompetensi pegawai (*coaching, mentoring, conseling*).
8. Belum terdapat inovasi yang dikembangkan dalam pengendalian gratifikasi.
9. Belum terdapat rencana tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.
10. Belum ada monev atas seluruh inovasi yang berbasis informasi dan teknologi.
11. Belum seluruh hasil survei kepuasan masyarakat telah dilakukan tindak lanjut.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja terus dilakukan PPPOMN dalam pemenuhan indikator kinerja “Indeks RB PPPOMN” hingga triwulan II, antara lain:

1. Pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder telah dilakukan secara berkala setiap bulan pada tri wulan 1 ini melalui subsite PPPOMN, instagram, whatsapp group, e-kios, majalah beraksi, kegiatan Campaign RB bersamaan dengan kegiatan Forum Komunikasi Publik dan BPFI User Forum.
2. Telah dilakukan penyempurnaan tools dan template laporan Monev RB tahun 2025 yang dilengkapi dengan monitoring kendala dan rencana tindak lanjut.

3. Telah dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM berupa penampilan data pegawai yang diperbaharui secara periodik di rumah PPPOMN
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja penempatan pegawai hasil rekrutmen sesuai dengan kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
5. Telah disusun matriks mutasi pegawai antar jabatan yang memperhatikan kompetensi jabatan
6. Telah disusun matriks realisasi pelaksanaan diklat dan pengembangan kompetensi pegawai
7. Dalam rangka meningkatkan pengawasan untuk mencegah terjadinya pengaduan yang ditindaklanjuti APIP, telah dilakukan
 - Reviu prosedur/IK yang terkait money pengaduan dan WBS
 - Integrasi pedoman layanan publik dengan SMAP
 - Peningkatan peran Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
8. Telah disampaikan nota dinas kepada seluruh Ketua Tim Kerja agar selalu memperhatikan dan memastikan pemenuhan indikator tahun 2025 lebih baik daripada tahun 2024, sehingga terjadi peningkatan yang berkelanjutan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pemenuhan indikator Indeks RB dapat tercapai didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi secara berkala implementasi Zi di PPPOMN untuk seluruh area perubahan dan *Agen of Change*.
2. Review Implementasi Zi oleh Auditor Internal
3. Tindak lanjut hasil penilaian oleh Auditor Internal
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian implementasi Zi oleh Inspektorat Utama
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Utama
6. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI
7. *Desk* penilaian implementasi Zi antara PPPOMN dengan Tim Penilai Internal/TPI (Inspektorat)

8. Meningkatkan nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap triwulan sangat membantu dalam memantau capaian target dari indikator ‘Indeks RB PPPOMN’, dimana dapat mengantisipasi dan melakukan revisi terkait anggaran dan target tahunan yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2025.

11. IK 11. Nilai AKIP PPPOMN

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Fokus evaluasi SAKIP PPPOMN meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome).

Ruang Lingkup evaluasi SAKIP pada PPPOMN meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Target nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PPPOMN tahun 2024 adalah 85,25 yang dinilai pada akhir tahun. Penilaian tersebut didasarkan pada lima komponen:

1. Perencanaan kinerja (24)
2. Pengukuran kinerja (24)
3. Pelaporan kinerja (12)
4. Evaluasi internal (20)
5. Capaian kinerja (20)

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.13 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" TW I

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW I 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai AKIP PPPOMN	84,4	-	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Target dan capaian Indikator Nilai AKIP PPPOMN dinilai pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian "Nilai AKIP PPPOMN" dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.14 Capaian Kinerja "Nilai AKIP PPPOMN" terhadap target tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai AKIP PPPOMN	85	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian kinerja TW II terhadap target tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena perhitungan capaian indikator Nilai AKIP PPPOMN dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan untuk mencapai target kinerja 2025 yaitu :

- Penyusunan perencanaan kinerja PPPOM meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, dan Manual IKU.
- Menyusun kertas kerja revidi target indikator kinerja secara lengkap dan informatif sehingga memudahkan untuk perhitungan capaian indikator tersebut
- Penyelarasan nomenklatur, target dan capaian realisasi pada dokumen PK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Interim, SKP dan SIMTERIS
- Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dan tahunan dengan memanfaatkan data kinerja yang up to date.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap bulan

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala setiap bulan, sehingga setiap kendala/ permasalahan yang muncul dalam pencapaian kinerja dapat segera dilakukan tindak lanjut.
- Evaluasi internal secara berkala setiap triwulan, dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya.
- Melakukan pemantauan kinerja individu secara berkala setiap triwulan (siklus pendek) dan tahunan.
- Tindak lanjut terhadap rekomendasi penilaian SAKIP tahun sebelumnya.
- Melakukan revisi terhadap indikator kinerja, target maupun definisi operasional yang sudah tidak sesuai.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap bulan dan triwulan sangat membantu dalam memantau capaian target dari indikator ‘Nilai AKIP PPPOMN’ serta kegiatan-kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target mengingat pada Laporan Kinerja tahun sebelumnya, target “Nilai AKIP PPPOMN” belum tercapai.

12. IK 12. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai IKPA antara lain :

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Hal III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk nilai EKA adalah:

1. Variabel efektifitas: Capaian Rincian Output (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan dan Formula Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2025

Nilai Kinerja = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.15 Capaian Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN TW II Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW II 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	95.84	-	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian “Nilai Kinerja Anggaran” dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.16 Capaian Kinerja “Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN” terhadap Target Tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian kinerja TW II terhadap target tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena perhitungan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Faktor penyebab tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

1. Revisi DIPA yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
2. Meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran setiap jenis belanja per bulan.
3. Penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kementerian keuangan untuk setiap jenis belanja per triwulan.
4. Percepatan penandatanganan kontrak barang/jasa dan belanja modal kontraktual dengan nilai 50 juta s.d 200 juta diselesaikan pada triwulan I
5. Penyelesaian tagihan yang dilaksanakan tepat waktu maksimal 17 Hari Kerja
6. Pengelolaan UP/TUP dilakukan secara tepat waktu dan akurat dan penggunaan UP KKP (Kartu Kredit Pemerintah)
7. Capaian output dilaporkan tepat waktu dan akurat
8. Surat Perintah Membayar disampaikan tepat waktu sehingga tidak adanya Dispensasi Surat Perintah Membayar
9. Penggunaan Standar Biaya Khusus (SBK) dalam perencanaan anggaran serta melakukan efisiensi SBK.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran
2. Meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan
3. Mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan
4. Mendorong percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual pada periode awal triwulanan
5. Mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual
6. Meningkatkan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, optimalisasi penggunaan UP dan TUP, dan mendorong penggunaan UP KKP

7. Meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran
8. Mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas
9. Penggunaan Standar Biaya Keluaran secara efektif dan efisien

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran adalah tersebut adalah:

1. Melakukan revisi Halaman III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan
2. Melaksanakan realisasi belanja setiap bulan sesuai dengan rencana penarikan dana yang tertuang dalam Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran disetiap triwulan mencapai target yang ditentukan oleh kementerian keuangan.
4. Penyelesaian tagihan dilakukan tepat waktu (tidak melebihi 17 hari kerja)
5. Pengelolaan UP dan TUP dilaksanakan tepat waktu
6. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui aplikasi SAKTI tepat waktu.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, capaian indikator dan output kegiatan pada setiap bulan.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim PPPOMN Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja PPPOMN untuk perbaikan kedepannya.

13. IK 13. Indeks Manajemen Risiko PPPOMN

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu atau alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko.

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = Skor Total / 16

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Capaian Kinerja terhadap Target TW II Tahun 2025

Tabel 3.17 Capaian Kinerja "Indeks Manajemen Risiko PPPOMN" TW II tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TW I 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	2,986	-	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

	yang optimal di PPPOMN						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja TW II dengan TW I tahun 2025

Mengingat realisasi dan capaian “Indeks Manajemen Risiko PPPOMN” dihitung pada akhir tahun maka realisasi dan capaian kinerja TW I dan TW II tahun 2025 belum dapat dibandingkan.

c. Capaian Kinerja terhadap Target Tahun 2025

Tabel 3.18 Capaian Kinerja “Indeks Manajemen Risiko PPPOMN” terhadap Target tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15	Akhir Tahun	Akhir Tahun	-

Capaian kinerja TW II terhadap target tahun 2025 belum dapat disimpulkan karena perhitungan capaian indikator Indeks Manajemen Risiko dinilai pada akhir tahun.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Analisis penyebab pencapaian keberhasilan/kegagalan indikator ini belum bisa dilakukan karena pengukurannya baru akan dilaksanakan di akhir tahun 2025.

e. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

-

f. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Melakukan sosialisasi, internalisasi yang lebih intensif atau optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan lain untuk pelatihan manajemen risiko, selain melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala dengan

adanya identifikasi risiko yang masuk dalam SAPA APIP setiap semester yaitu sebelum tanggal 20 Januari 2025 dan sebelum tanggal 20 Juli 2025.

g. Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja “Indeks Manajemen Risiko” pada laporan kinerja dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas maturitas manajemen risiko dalam mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko serta dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan terkait manajemen risiko

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi laporan kinerja Interim TW II tahun 2025 dapat dilihat pada matriks berikut:

Tabel 3.2.19 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Kode	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline**	Progres			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Timeline	
IK 1	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	-	-	-	-	-	-	-
IK 2	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	-	-	-	-	-	-	-
IK 3	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	-	-	-	-	-	-	-
IK 4	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-

IK 5	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	-	-	-	-	-	-	-
IK 6	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium							
	SKL Tingkat 5	SK SKL PPPOMN dan UPT dilingkungan PPPOMN dan Tools masih berupa draft	Monev SKL TW II dilakukan sesuai SK dan Tools	TW II	Monev SKL TW 1	Monev SKL TW II	TW II	- SK SKL PPPOMN telah disahkan - Monev pemenuhan SKL TW 2 telah terlaksana
	SKL Tingkat 4							
	- Balai Regional	SK SKL PPPOMN dan UPT dilingkungan PPPOMN dan Tools masih berupa draft	-	-	- Terbitnya SK Ka BPOM No. 161 Tahun 2025 ttg SKL UPT di Lingkungan BPOM	-	-	- SK SKL PPPOMN dan UPT telah disahkan - Monev pemenuhan SKL TW 2 telah terlaksana
	- BPKOM	SK SKL PPPOMN dan UPT dilingkungan PPPOMN dan Tools masih berupa draft	-	-	-	-	-	-
	- BPPB	-	-	-	-	-	-	-
	- Balai Kalibrasi	-	-	-	-	-	-	-
	SKL Tingkat 3	SK SKL UPT dilingkungan BPOM masih berupa draft	-	-	- Terbitnya SK Ka BPOM No. 161 Tahun 2025 ttg SKL UPT di Lingkungan BPOM - Asesmen dan fungsi Koordinasi Pengujian ke BBPOM Kupang April 2025	-	-	- SK SKL UPT telah disahkan - Monev pemenuhan SKL TW 2 telah terlaksana

	SKL Tingkat 2	- Draft SK SKL UPT BPOM belum di TTE Ka Badan POM - Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring akan dilaksanakan TW 2 - Rencana pendampingan pemenuhan SKL ke UPT - Monev pemenuhan SKL di akhir TW 2	- Konfirmasi terkait pengesahan SK SKL UPT BPOM oleh Ka Badan - Pelaksanaan Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring - Pelaksanaan pendampingan pemenuhan SKL ke UPT - Pelaksanaan Monev pemenuhan SKL TW 2	TW II	- Pengesahan SK SKL UPT BPOM (sudah di TTE Ka Badan POM) - Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring - Pendampingan pemenuhan SKL ke UPT - Monev SKL TW 2	-	TW II	- SK SKL UPT telah disahkan - Monev pemenuhan SKL TW 2 telah terlaksana
	SKL Tingkat 1	- Draft SK SKL UPT BPOM belum di TTE Ka Badan POM - Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring akan dilaksanakan TW 2 - Rencana pendampingan pemenuhan SKL ke UPT - Monev pemenuhan SKL di akhir TW 2	- Konfirmasi terkait pengesahan SK SKL UPT BPOM oleh Ka Badan - Pelaksanaan Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring - Pelaksanaan pendampingan pemenuhan SKL ke UPT sesuai rencana - Pelaksanaan Monev TW 2 terlaksana sesuai rencana	TW II	- Pengesahan SK SKL UPT BPOM (sudah di TTE Ka Badan POM) - Bimtek peningkatan kompetensi pengujian kimia secara daring - Pendampingan pemenuhan SKL ke UPT - Monev SKL TW 2	-	TW II	- SK SKL UPT telah disahkan - Monev pemenuhan SKL TW 2 telah terlaksana
IK 7	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	-	-	-	-	-	-	-
IK 8	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan	-	-	-	-	-	-	-

	farmasi dan pangan olahan							
IK 9	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	-	-	-	-
IK 10	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	-	-	-	-	-	-	-
IK 11	Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	-	-	-	-
IK 12	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	-	-	-	-	-	-	-
IK 13	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	-	-	-	-	-	-	-

3.3 REALISASI ANGGARAN

Dalam mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, didukung dengan alokasi anggaran yang sesuai. Penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan evaluasi dan analisis efisiensinya.

Analisis realisasi anggaran dilaksanakan per sasaran dan per program/kegiatan. Realisasi anggaran PPPOMN sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 24.618.029.316,00 atau 23.27% dari pagu yang dikelola PPPOMN sebesar Rp. 105.800.044.000,00, nilai pagu ini merupakan nilai pagu sebelum adanya blokir anggaran terkait dengan efesiensi pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran yang dikelola PPPOMN setelah adanya blokir anggaran adalah sebesar Rp39.958.231.000, sehingga jika dibandingkan dengan anggaran setelah blokir, maka realiasasi anggaran PPPOMN per Triwulan II Tahun 2025 adalah 61.61%.

Berikut realisasi anggaran per sasaran kegiatan yang ada pada PPPOMN :

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	IK No	Indikator	Anggaran	Realisasi TW II	% Realisasi
1	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IK 1	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	1.550.200.000	30.270.600	1.95%
		IK 2	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	501.447.000	106.327.700	21.20%
		IK 3	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	368.579.000	8.143.500	2.21%
		IK 4	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	94.040.000	0	0.00%
		IK 5	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	598.651.000	3.150.000	0.53%
2	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	IK 6	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	76.356.031.000	14.537.996.022	19.04%
		IK 7	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	3.677.000.000	973.253.051	26.47%
		IK 8	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	1.933.797.000	334.969.537	17.32%
3	03 - Layanan Publik PPOMN yang prima	IK 9	Indeks Pelayanan Publik PPOMN	1.048.765.000	132.629.842	12.65%
4	07 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi Yang optimal	IK 10	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	435.980.000	15.397.673	3.53%
		IK 11	Nilai AKIP PPPOMN	14.300.000	0	0.00%
		IK 12	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	19.219.238.000	8.475.891.391	44.86%
		IK 13	Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	2.016.000	0	0.00%
Total				105.800.044.000	24.618.029.316	23.27%

Untuk pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

Berikut rekapitulasi analisis terhadap efisiensi anggaran dalam pencapaian 13 (tiga belas) indikator kinerja PPPOMN:

Tabel 3.3.20 Efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja PPPOMN

No	Sasaran Kegiatan	IK No	Indikator	Output TW II			Input			IE	SE	TE	Kategori
				Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian Indikator (Output)	Target	Realisasi	% Capaian Indikator (Input)				
1	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	IK 1	Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	20	20	100	1,550,200,000	30,270,600	1.95	1.95	1	0.95	Perhitungan Akhir Tahun

	Olahan	IK 2	Persentase pemenuhan laboratorium hijau	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	501,447,000	106,327,700	21.20	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 3	Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	368,579,000	8,143,500	2.21	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 4	Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	94,040,000	0	0.00	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 5	Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	598,651,000	3,150,000	0.53	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
2	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	IK 6	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	62.8	65.9	105.00	76,356,031,000	14,537,996,022	19.04	18.13	1	17.13	Tidak Efisien
		IK 7	Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	77.99	78.10	100.14	3,677,000,000	973,253,051	26.47	26.43	1	25.43	Tidak Efisien
		IK 8	Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	76.48	76.61	100.17	1,933,797,000	334,969,537	17.32	17.29	1	16.29	Tidak Efisien
3	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	IK 9	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	1,048,765,000	132,629,842	12.65	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun

4	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IK 10	Nilai Pembangunan ZI PPOMN	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	435,980,000	15,397,673	3.53	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 11	Nilai AKIP PPOMN	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	14,300,000	0	0.00	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 12	Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	19,219,238,000	8,475,891,391	44.10	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun
		IK 13	Indeks Manajemen Risiko PPOMN	0	0	Perhitungan Akhir Tahun	2,016,000	0	0.00	Perhitungan Akhir Tahun	1	Perhitungan Akhir Tahun	Perhitungan Akhir Tahun

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, terdapat 4 IK yang sudah dapat dihitung perbandingan target dan realisasinya. 4 IK tersebut berkaitan dengan pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu, Standar Kemampuan Laboratorium, Metode Analisis dan Baku Pembanding. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi (TE) didapatkan bahwa 1 (satu) indikator Efisien dan 3 (Tiga) indikator mendapatkan hasil Tidak Efisien. Hasil tidak efisien dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada triwulan I tahun 2025 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang dilakukan pada triwulan II.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja PPPOMN Tahun 2025 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi PPPOMN pada TW II adalah **101,33** dengan predikat kinerja "**Istimewa**".
2. Dari 13 indikator kinerja PPPOMN yang ditargetkan TW II tahun 2025, 9 (sembilan) indikator dengan perhitungan realisasi dan capaian dilakukan di akhir tahun. Terdapat 4 (empat) indikator dengan kategori sangat baik (realisasi $100\% < x \leq 110\%$), yaitu (1) Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium, (2) Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (3) Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, (4) Persentase Pemenuhan Laboratorium Terkoneksi dalam Sesuatu Jejaring Secara Terpadu. Jika dibandingkan dengan target tahunan 2025, maka proyeksi pencapaian 1 (satu) indikator adalah **$\geq 100\%$** dengan **kategori Tercapai/melampaui**, 2 (dua) indikator dengan **kategori Akan Tercapai**, 1 (satu) indikator dengan **kategori Perlu Upaya Keras** dan terdapat 10 (sepuluh) indikator yang **Belum dapat disimpulkan**.
3. Penyerapan anggaran triwulan II sebesar Rp. 24.618.029.316 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan belas juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan persentase 61,61% terhadap pagu blokir mandiri dan 23,27% terhadap pagu awal sebelum blokir mandiri.

4.2. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi umum untuk peningkatan kinerja PPPOMN pada periode Renstra 2025-2029, antara lain:

1. Melaksanakan analisis dan reviu terhadap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan PPPOMN secara mendalam berdasarkan tren data capaian indikator 2020-2024, terutama untuk Indikator Kinerja yang menjadi baseline pada perencanaan strategis PPPOMN mendatang (Renstra 2025-2029). Reviu juga dilakukan terhadap definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja kegiatan PPPOMN.
2. Mengoptimalkan peran PPPOMN dengan berpartisipasi aktif pada jejaring laboratorium Obat dan Makanan, untuk memberdayakan laboratorium eksternal melalui pendampingan laboratorium eksternal dalam turut serta melakukan pengawasan Obat dan Makanan.
3. Untuk 9 (sembilan) indikator kinerja yang realisasinya pada akhir tahun akan terus dilakukan pemantauan progress setiap kegiatan agar target indikator tersebut pada akhir tahun dapat tercapai secara maksimal.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin/berkala untuk segera mengetahui kendala/permasalahan yang timbul agar segera dilakukan upaya perbaikan/tindak lanjut untuk mencapai target kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSAN GRACIA ARPAN
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

SUSAN GRACIA ARPAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu	42 Persentase
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium hijau	40 Persentase
		03 - Persentase implementasi digitalisasi laboratorium	30 Persentase
		04 - Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar	4 Jumlah
		05 - Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium	77 Nilai
2.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	04 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	65,5 Nilai
		05 - Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,91 Persentase
		07 - Presentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	80,04 Persentase
3.	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,7 Indeks
4.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI PPOMN	91,59 Nilai
		02 - Nilai AKIP PPPOMN	85 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5 Klasifikasi
		04 - Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,15 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 105,800,044,000 (Seratus Lima Miliar Delapan Ratus Juta Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	510,610,000
2.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	86,128,510,000
3.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,160,924,000

Jakarta, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



SUSAN GRACIA ARPAN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Memuatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase pemeriksaan laboratorium terkoneksi dalam sebuah jejaring secara terpadu						20	20	20	30	30	30	42	1,613,768,000
			NO	RO		KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI			
			1.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		I - Jejaring Laboratorium Obat Tradisional (JLOT)		70,800,000		70,800,000			
			2.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		H - Monitoring dan Evaluasi Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia		220,480,000		220,480,000			
			3.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		G - Pertemuan Jejaring Laboratorium Baku Pembandingan		129,730,000		129,730,000			
			4.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		F - Jejaring penguatan kapasitas laboratorium SEARN		14,225,000		14,225,000			
			5.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		E - Rapat Penyusunan Pedoman Teknis Jejaring dalam rangka Laboratorium Terintegrasi		24,830,000		24,830,000			
			6.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		D - Penguatan Laboratorium LRPI untuk Bahan Kontak (Kemasan) Pangan		53,075,000		53,075,000			
			7.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		C - Pelatihan Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan (JLPPI) GMP/DNA Spesifik Spesies		101,388,000		101,388,000			
			8.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory		B - Pertemuan LRPI (Jejaring Lab) MBM		34,000,000		34,000,000			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		9.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			A - Pertemuan Teknis Jejaring Pengujian Pangan Indonesia			41,700,000			41,700,000		
		10.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			H - Pelatihan dalam dan Luar Negeri			151,635,000			151,635,000		
		11.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			G - Partisipasi Aktif dalam Pertemuan Kegiatan Jejaring Laboratorium Kosmetik (ACTLC)			104,497,000			104,497,000		
		12.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			F - Pelatihan LRPI Kimia Pangan untuk Cemaran Logam, Mineral, dan Mikotoksin			105,750,000			105,750,000		
		13.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			E - Penguatan Laboratorium BPOM dalam Jejaring ASEAN Pangan (AFRL Food Additive)/workshop AFRL			92,250,000			92,250,000		
		14.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			D - Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Obat (ASEAN Pharmaceutical Testing Laboratory Committee /APTLC)			90,856,000			90,856,000		
		15.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM			A - Pengujian Sampel PQ WHO KOBO NAPPZA			300,000,000			300,000,000		
		16.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	053 - Pemenuhan grand design penguatan Integrated Laboratory			J - Pertemuan Teknis Jejaring Laboratorium Pangan (ASEAN Food Testing Laboratory Committee /AFTLC)			78,550,000			78,550,000		
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium hijau												40	389,429,000
		NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI		
		1.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	051 - Pemenuhan grand design penguatan Laboratorium Hijau (Green Laboratory)			A - Sosialisai Grand Desain Laboratorium BADAN POM (Green Laboratory)			389,429,000			389,429,000		
		03 - Persentase implementasi digitalisasi laboratorium												30	397,279,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN		
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12			
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		052 - Pemenuhan grand design penguatan Digitalisasi Laboratorium (Digital Laboratory)				B - Rapat Persiapan Penyusunan Grand Design Laboratorium BPOM (Digitalisasi Laboratorium)				31,850,000	31,850,000			
		2.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		052 - Pemenuhan grand design penguatan Digitalisasi Laboratorium (Digital Laboratory)				A - Sosialisasi Grand Desain Laboratorium BADAN POM (Digital Laboratory)				365,429,000	365,429,000			
		04 - Jumlah laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar											4	94,040,000			
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM				I - Pemberdayaan Laboratorium Eksternal untuk Sediaan Farmasi Umum				94,040,000	94,040,000			
		05 - Nilai Efektivitas implementasi regionalisasi laboratorium											77	618,403,000			
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI			
		1.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM				B - Pertemuan Nasional Monitoring dan Evaluasi Sistem Regionalisasi- Laboratorium BPOM				594,603,000	594,603,000			
		2.	DR.4133.PDD.001 - Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design		054 - Regionalisasi Laboratorium BPOM				C - Rapat Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium				23,800,000	23,800,000			
		2.	02 - Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	04 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium			61.5	61.5	61.5	62.8	62.8	62.8	64.1	64.1	64.1	65.5	76,356,031,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
			NO	RO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPOM		D - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Kimia OT OKSK		66,935,000		66,935,000				
			2.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		A - Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium		74,232,493,000		74,232,493,000				
			3.	DR.4133.CAB.001 - Sarana Pengujian Obat dan Makanan	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		B - Pengadaan penunjang sarana dan prasarana PPPOMN		69,000,000		69,000,000				
			4.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	051 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja		A - Pelatihan Dalam Negeri		145,430,000		145,430,000				
			5.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup		A - Workshop Dalam Negeri		150,156,000		150,156,000				
			6.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup		B - Asesmen dan Koordinasi ke BB/Balai POM		180,600,000		180,600,000				
			7.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup		C - Peningkatan Kompetensi SDM Laboratorium MBM		20,185,000		20,185,000				
			8.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup		D - Penilaian Kemampuan Pengujian LOKA POM		106,320,000		106,320,000				
			9.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup		E - Asesmen Kemampuan Pengujian Balai POM Baru (Balai POM di Kabupaten/Kota)		86,000,000		86,000,000				
			10.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		A - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Bimtek KONAPPZA		71,020,000		71,020,000				

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO	KOMPONEN		SUS KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
		11.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		B - Peningkatan Kapasitas Pengujian di Loka POM (Rapid Test Obat Napza) - Poksi KOBONAPPZA		68,830,000		68,830,000					
		12.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		C - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk Laboratorium Badan POM		49,012,000		49,012,000					
		13.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		D - Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kosmetik untuk Laboratorium Badan POM		40,592,000		40,592,000					
		14.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		E - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Kimia Pangan dan Air		90,970,000		90,970,000					
		15.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		F - Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM - Mikrobiologi		100,300,000		100,300,000					
		16.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	053 - Peningkatan kinerja laboratorium		G - Pemeliharaan Peralatan Laboratorium		632,688,000		632,688,000					
		17.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPCM		A - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Kimia Kosmetik		63,000,000		63,000,000					
		18.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPCM		B - Penyelenggaraan Uji Profisiensi kimia pangan dan air		46,000,000		46,000,000					
		19.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPCM		C - Penyelenggaraan Uji Profisiensi KOBONAPPZA		58,500,000		58,500,000					
		20.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPCM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	054 - Uji Profisiensi yang diikuti oleh BB/Balai POM dan lab non BPCM		E - Penyelenggaraan Uji Profisiensi Mikrobiologi dan Biologi Molekuler		78,000,000		78,000,000					

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		10. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian				C - Workshop Internal Laboratorium Kimia Pangan Olahan dan Air				27,263,000				27,263,000
		11. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian				B - Workshop Internal Laboratorium Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan				35,542,000				35,542,000
		12. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	053 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian				B - FGD Percepatan Pemanfaatan Fitofarmaka				66,800,000				66,800,000
		13. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	053 - Evaluasi/ konsultasi/ koordinasi dalam rangka peningkatan pengembangan pengujian				A - Penerapan Sistem Mutu (Surveilley/Audit Internal)				180,136,000				180,136,000
		14. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian				G - Pemeliharaan Alat Laboratorium				1,000,000,000				1,000,000,000
		15. DR.4133.AFA.001 - Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	052 - Peningkatan kapasitas pengujian				F - Workshop Internal Laboratorium BSL 2 dan BSL 3				11,830,000				11,830,000
		07 - Presentasi baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan			75.51	75.51	75.51	76.48	76.48	76.48	78.81	78.81	78.81	80.04	1,933,797,000
		NO RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN				KONTRIBUSI
		1. DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembandingan				B - Pembahasan Hasil Uji Baku Pembandingan I dengan Narasumber				92,900,000				92,900,000
		2. DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembandingan				A - Pembahasan Percepatan Pemenuhan Baku Pembandingan dengan Industri, Perguruan Tinggi, dan K/L lain				225,550,000				225,550,000
		3. DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembandingan				D - BPFI/BPL User Forum				14,575,000				14,575,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		4.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembandingan			C - Peningkatan Jumlah dan Jenis Baku Pembandingan Mikroba			135,000,000		135,000,000	
		5.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembandingan			B - Workshop Peningkatan Kompetensi Pengetelolaaan Baku Pembandingan			81,050,000		81,050,000	
		6.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			051 - Pengadaan/ Pengembangan Baku Pembandingan			A - Pengadaan Pengembangan Baku Pembandingan Nasional Tahun 2025			1,099,156,000		1,099,156,000	
		7.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembandingan			C - Peleaksanaan dan Pemeliharaan Kapasitas Pengembangan BP Kimia dan BP Mikroba (Monitoring dan evaluasi BP)			23,035,000		23,035,000	
		8.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembandingan			B - Pemeliharaan Alat Laboratorium			120,000,000		120,000,000	
		9.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			053 - Peningkatan Kapasitas Laboratorium Baku Pembandingan			A - Pelaksanaan dan Pemeliharaan Akreditasi Produsen Bahan Acuan			11,550,000		11,550,000	
		10.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembandingan			E - Pelaksanaan Pengembangan Baku Pembandingan Mikroba			54,841,000		54,841,000	
		11.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembandingan			D - Koordinasi hasil uji baku pembandingan di Yogyakarta			18,740,000		18,740,000	
		12.	DR.4133.AFA.002 - Baku pembandingan pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan			052 - Koordinasi dalam rangka pengembangan Baku Pembandingan			C - Pembahasan Hasil Uji Baku Pembandingan II dan III			57,400,000		57,400,000	
3.	03 - Layanan Publik PPPOMN yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik PPPOMN											4,7	1,048,765,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN		KONTRIBUSI		
		1.	DR.4133.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			A - Pengadaan Sarana Pengujian			452,335,000		452,335,000		
		2.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			A - Pelayanan Publik PPPOMN			28,312,000		28,312,000		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		3.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			B - Publikasi Pelayanan Publik PPPOMN				4,000,000		4,000,000	
		4.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			C - Inovasi Pelayanan Publik PPPOMN				17,262,000		17,262,000	
		5.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			D - Kerja Sama Antar Satker di B POM/Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga Terkait				116,296,000		116,296,000	
		6.	DR.4133.BAH.001 - Layanan Publik PPPOMN		051 - Layanan publik PPPOMN			E - Pengelolaan Pengujian Laboratorium PPPOMN				430,560,000		430,560,000	
4.	07 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan Zi PPPOMN											91.59	457,740,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			A - Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB				457,740,000		457,740,000	
		02 - Nilai AKIP PPPOMN											85	31,750,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			B - Rapat Penyusunan Renstra 2025-2029				31,750,000		31,750,000	
		03 - Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN											5	19,175,324,000	
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTRIBUSI	
		1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			D - Rapat Monev Anggaran				14,400,000		14,400,000	
		2.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			H - Administrasi Kegiatan Perkantoran				3,706,876,000		3,706,876,000	
		3.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			G - Langgaran Daya dan Jasa				6,016,200,000		6,016,200,000	
		4.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			F - Perawatan Gedung Kantor				499,400,000		499,400,000	
		5.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			E - Perawatan Peralatan Kantor				160,588,000		160,588,000	
		6.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			D - Perawatan Sarana Genset, Air, Listrik, Telepon dan Pembelian Solar				126,100,000		126,100,000	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
		7.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			C - Perbaikan Saranan Prasarana			485,587,000			485,587,000
		8.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			B - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4			73,800,000			73,800,000
		9.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor			A - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2			9,920,000			9,920,000
		10.	WA.6384.EBA.994 - Layanan Perkantoran			001 - Gaji dan Tunjangan			A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPOMN			8,073,703,000			8,073,703,000
		11.	WA.6384.EBA.956 - Layanan BMN			054 - Penatausahaan BMN			A - Penatausahaan, monitoring dan penyusunan laporan BMN			8,750,000			8,750,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko PPOMN												3.15	6,720,000
		NO	RO			KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI
1.	DR.3165.BKB.001 - Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			051 - koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			C - Pelaksanaan Manajemen Risiko PPOMN Tahun 2025			6,720,000			6,720,000		
Total													105,800,044,000		

Jakarta, 12 February 2025

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian

Obat dan Makanan Nasional

SUSAN GRACIA ARPAN